

## Memahami ACFTA dari Perspektif ‘Masyarakat Jaringan’

Muhtar Habibi

### *Abstract*

*This paper tries to explain the ACFTA from the perspective of the network society. This paper argues, the establishment of ACFTA is an effort to expand capital in Cina-ASEAN region which is supported by both MNC and a network of political-economic elites who embrace neo-classical paradigm, especially export-oriented industrialization strategy. The development of Information and Communication Technology (ICT) has enabled the implementation of the MNC's global production using 'global commodity chain'. At the same time, political elites need the flow of capital to boost exports and spur economic growth. They believe that everything that can attract foreign investment needs to be done. One of them is to eliminate trade barriers and create stability in the region to ensure smooth production of foreign investors. Cooperation between the MNC with the political economic elites in both regions finally managed to encourage the formation of ACFTA. Under such a condition, inequality between economic and political elites on one hand, and the masses, on the other in the two regions widened. Political economic elites in both regions are embodied in the dominant network to enjoy more fruits of growth, while the mass largely enjoy just the remainder of the development cake. Today, the gap is not only evident between countries, but also between networks of people. Only by establishing and strengthening alternative networks, can the exploitative effects of dominant networks be minimized.*

**Keywords:** ACFTA, network society, export-oriented industrialization, inequality, alternative network

### **Pendahuluan**

ACFTA (ASEAN-Cina Free Trade Area) adalah isu yang mengundang pro dan kontra pada medio awal tahun 2010. Berbagai tanggapan, baik yang sepakat maupun yang menolak perjanjian perdagangan bebas ASEAN-Cina itu hampir tiap hari menghiasi media massa cetak dan elektronik. Pro-kontra biasanya berakar pada dua argumen yang saling bertolak belakang. Bagi mereka yang setuju dengan ACFTA, perjanjian itu dilihat dapat meningkatkan aliran investasi asing dari Cina dan mendorong naiknya volume ekspor. Selain itu, perdagangan bebas kawasan juga diharapkan mendorong sektor

domestik untuk lebih meningkatkan daya saing produknya. Sebaliknya, bagi mereka yang menolak ACFTA, keberatan yang sering dikemukakan adalah kekhawatiran terhadap industri dan perdagangan domestik yang akan gulung tikar karena tidak mampu bersaing dengan produk Cina yang dikenal murah. Perdebatan ini sebenarnya mengasumsikan bahwa aktor-aktor yang dijadikan sebagai unit analisis adalah negara. Bagi yang sepakat, ACFTA akan menguntungkan Indonesia, sementara bagi yang menolak, Cina yang akan meneguk lebih banyak keuntungan. Asumsi semacam ini sudah tidak memadai lagi untuk melihat realitas yang ditandai globalisasi ekonomi di mana unit-unit ekonomi global tidak lagi didominasi negara saja, tapi juga *Multi-National Corporation (MNC)*.

Oleh karena itu, daripada berupaya mengidentifikasi siapa yang diuntungkan dan dirugikan berdasarkan unit negara, tulisan ini berpendapat, yang diperlukan adalah mengidentifikasinya menggunakan basis 'jaringan'. Dalam pendekatan jaringan, unit analisis adalah keterkaitan orang dalam suatu jalinan kepentingan bersama yang melampaui batas-batas tradisional seperti negara, kedaerahan, etnis, dan agama. Pendekatan jaringan mulai relevan untuk memahami masyarakat yang telah berubah. Berkembangnya teknologi informasi telah meredefinisi ruang dan waktu. Proses redefinisi ini mendorong transformasi masyarakat tidak hanya pada bidang ekonomi, tapi juga politik, sosial dan budaya. Lahirnya ekonomi jaringan, negara jaringan, hingga kawasan perdagangan bebas menandai proses transformasi ini. Tapal batas tradisional seperti etnis dan agama mulai mengabur dengan mengentalnya kepentingan bersama yang melampaui batas-batas tersebut. Diperlukan sebuah pendekatan baru dalam melihat realitas yang berubah. Oleh karena itu, mungkin akan memberikan manfaat jika kita menggunakan perspektif jaringan untuk memahami pembentukan kawasan perdagangan bebas seperti ACFTA. Dengan menggunakan perspektif jaringan, tulisan ini berupaya mengidentifikasi aktor-aktor yang diuntungkan dan dirugikan dari terbentuknya ACFTA. Pertanyaan-pertanyaan yang berusaha dijawab dalam tulisan ini adalah bagaimana perspektif masyarakat jaringan menjelaskan terbentuknya ACFTA? Bagaimana dampak ACFTA bagi masyarakat di kawasan? Lalu bagaimana perubahan dapat dilakukan?

### **'Network Society': Sudut Pandang Melihat Masyarakat Kontemporer**

Masyarakat kontemporer tentu telah berubah dan berbeda dengan masyarakat setengah abad yang lalu. Sejak munculnya teknologi informasi, transformasi masyarakat terus berlangsung secara massif. Tidak hanya dalam bidang ekonomi, tapi juga politik, sosial dan budaya. Pemahaman terhadap perubahan ini telah dikemukakan oleh banyak pengamat, salah satu yang menyita perhatian adalah Manuel Castel dengan teorinya tentang 'masyarakat

jaringan'<sup>1</sup>. Merujuk pada Castells (2010), kemajuan teknologi informasi telah mengubah sifat ekonomi, negara dan masyarakat.

Di bidang ekonomi, Castells melihat tiga ciri kontemporer yang membedakannya secara fundamental dari era sebelumnya. Castells menyebut ekonomi pada era sekarang berciri: informatif, global, dan bersifat jaringan (2010: 77). Informatif karena daya saing unit ekonomi (baik individu, perusahaan, negara, maupun kawasan) ditentukan oleh kapasitas mereka dalam membentuk, memproses, dan mengaplikasikan pengetahuan yang berbasis informasi. Ekonomi saat ini juga bersifat global mengingat kegiatan inti dari produksi, konsumsi, distribusi, dan komponen penopangnya (dari mulai modal, tenaga kerja, bahan material, manajemen, informasi, teknologi dan pasar) diorganisasikan secara global, baik secara langsung maupun melalui jaringan terkait di antara agen ekonomi. Selanjutnya ekonomi saat ini juga ditandai oleh sifat jaringan. Produktivitas ekonomi ditentukan oleh kompetisi antar jaringan bisnis dalam sebuah jaringan global. Castells memberi contoh bagaimana 'perusahaan jaringan' yang memainkan peran penting dalam perekonomian global. Sekarang banyak perusahaan besar yang melakukan desentralisasi, melakukan subkontrak dengan usaha kecil dan menengah, atau melakukan *strategic alliance* dengan sesama perusahaan besar. Intinya, unit-unit ekonomi dikaitkan dalam sebuah jaringan. Dalam jaringan seperti ini, orientasi bukan lagi pada tugas, tapi pada penyelesaian proyek. Proyek satu selesai, susunan pemain akan berganti baik dari perusahaan besar maupun dari usaha kecil dan menengah. Ringkasnya, unit produksi bukan lagi perusahaan, tapi proyek<sup>2</sup>.

Selain bidang ekonomi, kemajuan teknologi informasi juga telah mengubah sifat negara. Menurut Castells, negara dalam suatu masyarakat jaringan berubah menjadi 'negara jaringan' (2000: 14). Pada satu sisi, negara cenderung membangun kerjasama antarnegara dan membagi kedaulatan untuk memperoleh pengaruh. Ini bisa dilihat dengan munculnya EURO,

---

1 'Masyarakat jaringan' adalah karya pertama Castells dalam trilogi bukunya tentang masyarakat informasi. Buku kedua yang berjudul *The Power of Identity*, menggambarkan kekuatan identitas dalam sebuah masyarakat jaringan. Castells melihat munculnya masyarakat jaringan dan makin menguatnya identitas sebagai pertarungan kekuasaan, telah menentukan bentuk globalisasi, geopolitik dan transformasi social di awal abad 21. Karya Castells yang ketiga diberi titel *End of Millennium*. Ulasan dalam buku ketiga ini menjelaskan kecenderungan statisme yang makin menguat, jaringan kriminalitas ekonomi global yang terus berkembang, dan kecenderungan deregulasi global sebagai dampak globalisasi. Selengkapnya lihat: (M. Castells, 2010, *The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II*. Oxford, UK: Blackwell Publishing Company). Juga (M. Castells, 2010, *End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III..* Oxford, UK: Blackwell Publishing Company).

2 Mengenai sifat jaringan dalam perusahaan global dapat dilihat diantaranya Coe, et.all (2004) yang mengamati jaringan produksi global perusahaan mobil BMW; Yeung (1997) yang menggambarkan jaringan produksi perusahaan Hong Kong di Asia Tenggara; juga Felker (2003) yang menjelaskan perubahan produksi global yang dilakukan Multi-National Corporation (MNC) di Asia Tenggara.

NATO, dan berbagai *regional trade agreement* lainnya, termasuk ACFTA. Pada sisi lain, untuk memperoleh legitimasi, negara melakukan transfer kekuasaan, mendesentralisasikan kewenangan dan sumberdaya pada level nasional, daerah, dan pemerintahan lokal, dan juga pada NGO. Peran lembaga non-negara dalam arena internasional yang berpengaruh dan bersumberdaya telah merubah negara yang baru ini. Negara di zaman informasi adalah 'negara jaringan', negara membuat jaringan kompleks dalam pembagian kekuasaannya. Melakukan negosiasi pengambilan keputusan dengan lembaga politik, MNC maupun LSM dari tingkat internasional, nasional, daerah hingga lokal.

Bagi Castells, pergeseran-pergeseran yang terlihat pada dimensi ekonomi dan negara mengindikasikan munculnya sebuah masyarakat baru: 'Masyarakat Jaringan'. Castells (2000: 1) mendefinisikannya sebagai berikut: *"The network society is a specific form of social structure tentatively identified by empirical research as being characteristic of the information age"*. Ciri spesifik yang dimaksud Castells adalah adanya rangkaian keterhubungan antar titik. Titik sendiri adalah: *"...the point at which a curve intersects itself"* (2010: 501). Beberapa titik ini dapat dilihat secara konkret pada pasar modal di New York yang terhubung dalam jaringan aliran modal yang merentang dari Tokyo, London, Berlin, Dubai, Shanghai, Jakarta, dan titik-titik dalam jaringan modal yang lain. Atau geng jalanan, pengedar narkoba, pencucian uang yang berhubungan dalam suatu jaringan kejahatan Multi-nasional yang terbentang dari Meksiko, New York, Amsterdam, Teheran, Jakarta, hingga Hongkong.

Dalam logika jaringan, pekerjaan dilakukan secara terdesentralisasi, kewenangan pengambilan keputusan dibagi kepada titik-titik yang terjalin dalam jaringan. Tidak ada pusat dalam konteks seperti ini. Jaringan bekerja menggunakan logika binari, inklusi atau eksklusif (Castells, 2000: 15). Semua yang terhubung dalam jaringan dianggap berguna dan penting bagi jaringan. Sementara yang diluar jaringan dianggap tidak ada. Titik-titik yang berada di luar jaringan mesti dianggap tidak relevan bagi kepentingan jaringan. Bahkan perlu dimusnahkan jika berpotensi mengganggu pencapaian tujuan jaringan. Anggota atau titik-titik dalam jaringan yang 'tidak bekerja' akan diganti dengan titik baru. Dari sinilah muncul susunan jaringan baru. Kegiatan investor memindahkan investasinya dari satu negara (titik) ke negara (titik) lain adalah contoh konkret perubahan susunan jaringan ini.

Meskipun tidak ada 'pusat', namun satu titik mungkin lebih penting dibanding titik yang lain. Suatu titik menjadi lebih penting dari titik yang lain bukan karena struktur hirarkis,<sup>3</sup> tapi karena kelebihanannya dalam menyerap

3 Ini juga berlaku pada perusahaan bisnis yang dimiliki negara. Begitu masuk dalam jaringan, State-Owned Enterprise (SOE) dituntut untuk memiliki logika dan manajemen yang sama dengan yang digunakan jaringan dominan (MNC). SOE di Cina melakukan reformasi besar-besaran di tahun 1980-an untuk mengikuti 'aturan main' dalam strategi Expor-oriented Industrialization (EOI) yang dipelopori MNC. Selengkapnya lihat Lin & Germain (2003: 1134-1135).

dan mengolah informasi secara efisien. Ketika suatu titik bekerja di bawah standar, ia akan digantikan oleh titik jaringan yang baru. Dengan demikian, pentingnya suatu titik tidak ditentukan oleh suatu ciri khusus tertentu, tapi lebih karena kemampuannya untuk dipercaya oleh jaringan dalam berbagi informasi. Jadi dalam pemahaman seperti ini, suatu titik yang penting bukanlah 'pusat', tetapi lebih sebagai 'switchers', pemindai gelombang informasi yang mengikuti logika jaringan daripada logika perintah (Castells, 2000: 15). Pasar uang di London mungkin lebih penting dari pasar uang di Jakarta. Akan tetapi, beroperasinya jaringan pasar keuangan global akan terganggu jika satu titiknya (Jakarta) mengalami disfungsi. Semua titik dalam jaringan saling membutuhkan. Ada hubungan saling-ketergantungan antar titik. Tidak ada titik yang mendominasi secara sistemik.

Jika tidak ada pusat, lalu siapa yang menetapkan tujuan dan memastikan seluruh anggota jaringan berupaya meraih tujuan itu? Aturan siapa yang harus diikuti? Castells menjelaskan bahwa jaringan bersifat 'automaton' (2000: 16). Pada awalnya, aktor-aktor sosial saling bersaing dan berjuang untuk mendesakkan tujuannya masing-masing agar diadopsi sebagai tujuan jaringan. Selanjutnya, pemenang dari perjuangan itulah yang tujuannya akan ditetapkan sebagai tujuan jaringan. Sekali tujuan jaringan telah ditetapkan, aktor yang lain akan mengikuti. Jika ada aktor yang tidak setuju dan punya tujuan lain, ia bisa keluar dari jaringan dan membangun jaringan baru.<sup>4</sup>

Menurut Castells, pada dasarnya, 'jaringan' adalah bentuk pengorganisasian yang tidak baru. Di satu sisi, jaringan memudahkan organisasi untuk adaptif dan fleksibel terhadap lingkungan yang berubah. Namun di sisi lain, sifat jaringan menyulitkan fungsi koordinasi dan fungsi optimalisasi sumberdaya pada tujuan tertentu dalam mengelola kompleksitas lingkungan. Namun Castells menyatakan, sejak adanya teknologi informasi, jaringan tetap dapat fleksibel sehingga lebih adaptif terhadap perubahan lingkungan. Sementara pada saat bersamaan, jaringan yang ditopang teknologi informasi memungkinkan koordinasi dan mengelola kompleksitas dalam suatu sistem interaksi timbal-balik dan pola komunikasi dari manapun dan kapanpun (Castells, 2010: 15).

Dengan ini, Castells ingin menyatakan bahwa munculnya teknologi informasi adalah kondisi pendorong utama bagi lahirnya masyarakat jaringan, meskipun bukan faktor satu-satunya. Teknologi informasi telah mendorong lahirnya jaringan informasi. Ini yang menjadikan kita berada dalam jaman informasi. Yang dimaksud Castells (2000: 5-6) dengan jaman informasi adalah: "...a historical period in which human societies perform their

---

4 Dalam konteks ACFTA, anggota jaringan pada dasarnya memiliki peluang untuk keluar dan membentuk jaringan baru. Namun karakter jaringan dominan yang menguasai sebagian besar sumberdaya membatasi pilihan negara yang ingin keluar. Ketergantungan titik (negara) terhadap aliran sumberdaya dari jaringan (Foreign Direct Investment/FDI) membuat suatu titik berpikir ulang sebelum memutuskan keluar dan mendirikan jaringan alternatif (baru).

*activities in a technological paradigm constituted around micro-electronic-based information/communication technologies and genetic engineering”..*

Jaringan informasi pada gilirannya telah mengubah persepsi manusia terhadap ruang dan waktu (2000: 13-14). Terjadi redefinisi terhadap dua konsep itu. Waktu kini dibuat menjadi tidak terbatas. Di satu sisi, waktu ditekan untuk menghasilkan sesuatu secara serba instan. Slogannya menjadi ‘*time is money*’. Sementara di sisi lain, waktu dibuat tidak berurutan, menjadi pola acak. Dengan hadirnya serbuan tayangan multimedia, urutan masa lalu, masa kini, dan masa depan menjadi kabur. Tayangan waktu dulu bisa ditampilkan kembali untuk seolah-olah dianggap sebagai masa kini. Tayangan masa kini bisa dirangkai sedemikian rupa untuk memberikan bayangan masa depan. Redefinisi juga terjadi terhadap ruang. Ruang kini dibuat menjadi tidak berarti dengan hadirnya teknologi informasi. *Video conference, chatting* telah digunakan secara meluas di berbagai bidang kehidupan untuk memangkas ruang. Redefinisi ruang dan waktu yang dimungkinkan oleh lahirnya teknologi informasi inilah yang menjadikan logika jaringan tertanam sebagai karakter menonjol dalam masyarakat kontemporer. Karakter jaringan ini pula yang perlu kita perhatikan dalam memahami munculnya berbagai kawasan perdagangan bebas, termasuk ACFTA. Untuk melihat karakter jaringan dalam ACFTA, kita perlu terlebih dahulu memahami Cina kontemporer dan alasannya mengusulkan ACFTA.

### **Memahami Cina**

Cina dalam satu dekade terakhir sering digambarkan sebagai ‘raksasa baru’ ekonomi dunia. Sejak reformasi ekonomi tahun 1978, pertumbuhan ekonomi Cina mencapai yang tertinggi dengan rata-rata 10% per tahun sejak 1990-an (Yue, 2004: 1). Tingkat GDP (*Gross Domestic Product*) Cina juga mengalami peningkatan signifikan. Pertumbuhan GDP Cina rata-rata sejak 1990-2001 mencapai 10% per tahun. Pertumbuhan GDP diproyeksikan akan terus berlanjut pada level 7% per tahun dalam 10-15 tahun mendatang (Yue, 2004: 2). Dalam 15 tahun dari 1995-2005, rata-rata pertumbuhan GDP Cina adalah 8,7%. Sementara India hanya 4% dan negara berkembang lain di Asia hanya 2,7% (Dollar, 2007: 4). GDP Cina meningkat empat kali lipat selama 20 tahun (1978-1995). Pendapatan per kapita riil meningkat lebih dari tiga kali di perkotaan dan hampir empat kali di daerah pedesaan. Dari tahun 2003, Cina menjadi negara perdagangan dan ekspor ekonomi terbesar keempat di dunia dari yang sebelumnya peringkat 23 pada tahun 1978 (Yao, 2005: 85).

Cina telah menjadikan dirinya sebagai salah satu negara adidaya ekonomi bersama Amerika, Jepang, dan Uni Eropa. Cina menjadi produsen terbesar bagi produk-produk primer, seperti biji-bijian, daging, benang dan kapas, kacang, buah, baja, batubara, semen, pupuk kimia, dan televisi. Pada

tahun 2003, Cina memproduksi lebih banyak baja dan produk baja daripada kombinasi output dari ekonomi terbesar di dunia: Amerika dan Jepang (Yao, 2005: xv).

Berubahnya Cina dari negara yang terbelakang menjadi salah satu pemain ekonomi terbesar di dunia tidak dapat dilepaskan dari diadopsinya strategi pembangunan '*open door policy*' (Weatherly, 2006: 12). Strategi ini mulai diterapkan setelah pergantian pemimpin Cina dari Mao Zedong ke Deng Xiaoping tahun 1978. Pada masa Mao, dengan pendekatan sosialis dalam perekonomian, harga dikontrol secara ketat oleh negara dan industri substitusi impor dilakukan (Yao, 2005: 92). Masa sebelum reformasi ekonomi ini ditandai oleh transformasi sistem feodal yang didominasi dengan kepemilikan pribadi menjadi sistem sosialis yang ditandai dengan kepemilikan bersama dalam Komunitas Rakyat<sup>5</sup>. Selain itu, terdapat beberapa gerakan politik yang berupaya melakukan transformasi menuju sistem sosialis: reformasi tanah (1949-1952), *Great Leap Forward* (1958-1961), dan Revolusi Kebudayaan (1966-1976). Gerakan-gerakan itu lebih sering diasosiasikan dengan karisma Mao yang mengendalikan perjuangan. Pada masa ini, pembangunan ekonomi memang penting, tapi Mao selalu berusaha mencapai tujuan ekonomi dengan cara politis.

Strategi pembangunan seperti ini ternyata tidak memuaskan bagi banyak penerus Mao. Setelah ditetapkan sebagai pengganti Mao, Deng Xiaoping mengeluarkan pernyataan yang terkenal: "tidak jadi soal kucing itu berwarna hitam atau putih, yang penting ia dapat menangkap tikus" (Hughes, 2002: 3). Pernyataan ini menyiratkan sejarah baru bagi Cina. Ideologi tidak lagi jadi hal penting, yang penting bisa memberikan hasil yang memuaskan. Deng Xiaoping pun segera melakukan reformasi ekonomi. Pemilikan bersama dalam bidang pertanian dilucuti dan tanggungjawab produksi diserahkan pada industri yang dipimpin oleh negara. Petani diberi alokasi tanah untuk individual dan berhak menjual sebagian tanahnya melalui mekanisme pasar. Perusahaan swasta domestik dan asing didorong untuk menciptakan kompetisi dan meningkatkan efisiensi alokasi sumberdaya. Industri substitusi impor dan pemenuhan kebutuhan sendiri diganti dengan industri berorientasi ekspor dan keterbukaan terhadap investasi asing agar teknologi modern dan kemampuan manajerial dan praktik organisasi terbaik berlevel internasional dapat diterapkan di Cina. Berbagai metode reformasi itu dilakukan secara bertahap dengan cara *trial and error* (Yao, 2005: 22-23).

Pergeseran strategi pembangunan ini sangat dipengaruhi oleh logika ekonomi neo-klasik. Upaya untuk meningkatkan pendapatan dan taraf hidup masyarakat dilakukan dengan menggenjot pertumbuhan ekonomi.

---

5 Pendapatan dari pertanian kolektif dialokasikan kepada tiap tim produksi yang terdiri dari 25-30 rumah tangga. Pendapatan didasarkan pada kebutuhan rumah tangga dan akumulasi poin kerja yang dicatat tiap hari. Disini bobot 'distribusi berdasar kebutuhan rumah tangga' dan 'berdasarkan pekerjaan' berbeda antar daerah dan waktu (Benjamin et, all, 2005: 6).

Pertumbuhan ekonomi diharapkan dapat meningkatkan hasil produksi masyarakat (*Gross Domestic Product/GDP*). Kapasitas produksi yang membesar akan menyerap banyak tenaga kerja. Ini diharapkan dapat mengurangi pengangguran. Pada saat bersamaan, upah yang diterima dapat meningkatkan daya beli masyarakat. Konsumsi yang tinggi akan merangsang produksi selanjutnya dan ekspansi produksi akan menyerap tenaga kerja lebih banyak lagi, dan begitu seterusnya. Pada gilirannya, persoalan kemiskinan akan teratasi dengan sendirinya. Pertumbuhan tinggi akan menghasilkan '*trickle down effect*' bagi masyarakat miskin.

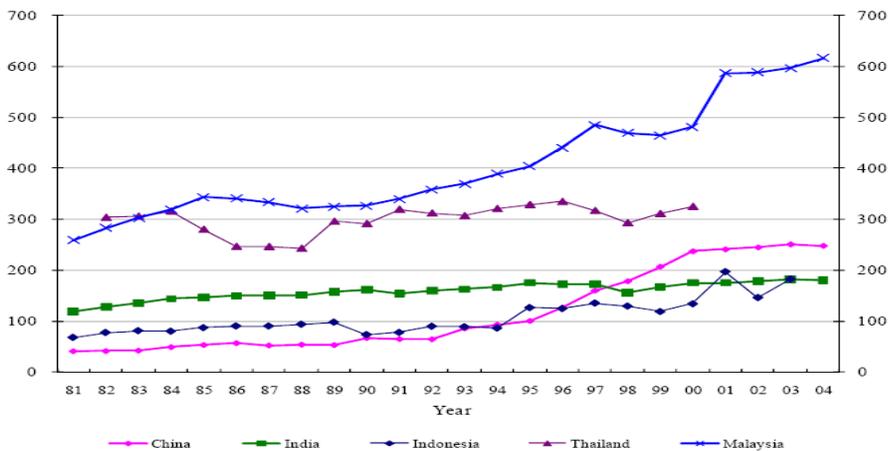
Pertumbuhan ekonomi hanya dapat ditingkatkan jika terdapat beberapa faktor produksi tersedia: tanah, teknologi, tenaga kerja, dan terakhir yang dianggap terpenting adalah modal (uang). Tanah tentu saja tersedia melimpah di negeri daratan terluas di muka bumi itu. Begitu pula lautan tenaga kerja yang siap mengisi barak-barak pabrik di seantero Cina. Namun faktor produksi kedua dan terakhirlah yang kurang dimiliki Cina. Untuk tujuan itu, Cina melihat bahwa dua faktor produksi itu hanya bisa dipenuhi sekaligus melalui investasi asing. Investasi asing tidak hanya akan menyediakan modal bagi pendirian infrastruktur baru (jalan, listrik, pabrik) bagi sarana produksi, tapi juga diharapkan dapat menularkan teknologi canggih yang digunakan kepada Cina.

Pentingnya investasi asing telah membuat Cina melakukan berbagai upaya untuk menarik investor. Sejak Juli 1979, Cina melansir kebijakan membentuk kawasan ekspor khusus di Zhuhai, Shantou, dan Shenzhen di Provinsi Guangdong serta Xiamen di Provinsi Fujian. Mei 1980, zona kawasan ini diganti namanya menjadi Kawasan Ekonomi Khusus (KEK). Sedangkan empat belas kota di sepanjang pantai, bersama-sama dengan pulau Hainan ditetapkan sebagai "kota-kota bebas" yang setaraf kedudukannya dengan kawasan ekonomi khusus (Nainggolan, 1995: 152). Di kawasan-kawasan tersebut, pemerintah setempat (pemerintah daerah) diizinkan untuk mengambil langkah-langkah untuk mendorong pengembangan ekonomi tanpa perlu persetujuan dari pemerintah pusat. Selain itu, kepemilikan swasta dan investasi asing disahkan di kawasan-kawasan ini. KEK dan kota-kota terbuka ini secara efektif menjadi laboratorium bagi investasi asing dan campuran (Wong&Chu,1985:7). Pada tahap selanjutnya Cina membuka 54 kawasan pengembangan ekonomi dan teknologi tingkat nasional serta kawasan industri yang menikmati kebijakan khusus.

Selain pembukaan KEK, upaya menarik investasi asing dilakukan Cina dengan membangun infrastruktur dan mengembangkan sumberdaya manusia yang terampil. Namun tentu saja menciptakan stabilitas sosial-politik adalah kunci utama bagi pembentukan iklim investasi yang baik. Untuk kepentingan ini, pemerintahan Cina menjalankan pemerintahan tersentral dengan mengesampingkan demokrasi. Kebijakan dibuat secara tertutup. Kebebasan politik masyarakat dibatasi meskipun ada desentralisasi ekonomi

dan administrasi (Landry, 2008). Kelompok masyarakat yang menuntut demokratisasi bahkan direspon dengan aksi represif.<sup>6</sup> Buruh industri yang berpotensi menciptakan gejolak industrial, dikondisikan dalam satu wadah (*All Cina Federation of Trade Unions*) agar mudah dikontrol pemerintah. Buruh murah yang terkontrol menjadi keunggulan komparatif Cina dalam menarik investasi (Gabriel, 2006; Yang, Chen and Monarch, 2009; Antentas and Vivas, 2008; Yu, 2009). Tidak mengejutkan jika buruh di Cina ternyata menerima upah terendah diantara rekan mereka di negara-negara berkembang lainnya (Yang, Chen dan Monarch, 2009: 33-34).

**Grafik 1.**  
Perbandingan Upah Bulanan Buruh Industri Cina dengan Beberapa Negara Asia Lain  
(dalam nilai US \$ tahun 2007)



Sumber: Yang, Chen & Monarch (2009: 34)

Seperti yang terlihat dalam grafik 1, upah buruh industri Cina bahkan masih lebih rendah dari rekan mereka di Thailand, India, apalagi Malaysia. Upah di Cina hanya sedikit di atas Indonesia, itu pun baru dimulai sejak dekade 1990-an. Kondisi ini akan semakin buruk jika dibandingkan dengan negara industri maju di Asia lainnya seperti Hongkong, Singapura, Jepang, dan Korea Selatan. Pada tahun 2007, upah buruh industri Cina hanya sekitar 7% dari buruh Jepang, 8-9% buruh Korea dan Singapura, dan hanya sekitar 18-21% dari upah buruh di Taiwan dan Hongkong (Yang, Chen and Monarch,

6 Contoh paling tragis adalah tragedi Tiananmen 1989. Tragedi ini merupakan pembantaian massal yang dilakukan militer Cina terhadap ribuan demonstran di lapangan Tiananmen. Seratus ribuan mahasiswa, buruh dan berbagai kelompok lainnya menuntut demokratisasi politik seperti yang terjadi di Rusia. Demonstran menolak liberalisasi ekonomi yang dijalankan dengan cara otoriter. Tragedi ini bahkan telah menunda pembicaraan tentang rencana bergabungnya Cina ke dalam WTO (Hughes, 2002: 12)

2009: 17). Tidak hanya upah yang rendah, buruh di Cina juga sering dipaksa untuk bekerja selama 12-16 jam sehari pada masa puncak permintaan produksi (Bernardino, 2004: 8). Upah rendah, kondisi kerja yang buruk, jaminan keselamatan dan kesehatan kerja yang tidak memadai, dan pelanggaran terhadap peraturan ketenagakerjaan<sup>7</sup> oleh perusahaan nampaknya adalah realitas harian yang harus dihadapi buruh-buruh di Cina (Antentas & Vivas, 2008).<sup>8</sup>

Sejak reformasi ekonomi, buruh Cina menghadapi kerentanannya yang makin besar setelah penerapan pasar kerja fleksibel ala neoliberal (Gabriel, 2006: 43). Orang-orang dibiarkan bersaing secara bebas memperebutkan pekerjaan. Di tengah lautan pencari kerja yang terus bertambah sementara penawaran kerja relatif tetap, upah cenderung ditentukan pada tingkat yang rendah. Di tengah kondisi seperti ini, buruh tidak memiliki perlindungan substantif terhadap hak mereka. Organisasi buruh yang independen dari birokrasi negara tidak diijinkan berdiri (Yu, 2009). Seorang pengamat menyatakan:

*“CPC ideology claims that the party represents the interests of the working people. Unfortunately for those who must depend on wage labor employment for their livelihood, there is no mechanism by which to change representatives. The combination of factors working against the bargaining position of workers in this new capitalist labor power market is such that it is epitomized by relatively low wage rates and relatively high rates of exploitation” (Gabriel, 2006: 43).*

Sejumlah upaya yang dilakukan pemerintah Cina itu ternyata berhasil mendatangkan investasi asing dalam jumlah besar. Investasi asing melalui Foreign Direct Investment (FDI) pada akhir 1982 memang hanya mencapai \$0.64 milyar. Namun angka ini meningkat secara bertahap dan mencapai \$4.37 milyar pada tahun 1991. Setelah pawai Deng Xioping yang terkenal ke kawasan selatan Cina pada tahun 1992, FDI mulai meningkat secara signifikan. Pada tahun itu, FDI mencapai \$11.3 milyar dan terus meningkat menjadi \$27.5 milyar pada tahun 1993, \$33.8 milyar tahun 1994 dan \$53.5 milyar pada

7 *Cina Labor Watch*, lembaga pemantau hak buruh yang berbasis di New York, telah melaporkan sejumlah pelanggaran hak-hak buruh yang bertentangan dengan pernyataan resmi pemerintah. Pelanggaran dilakukan oleh berbagai perusahaan asing seperti Wal-Mart, Mc Donalds, Dell computers, Kodak, dan Samsung. Mereka menolak memberi ijin bagi pendirian serikat buruh di perusahaannya, meskipun ini dijamin dalam peraturan hukum di Cina. Bagi buruh yang berusaha memperjuangkan hak-haknya, mereka biasanya berakhir di penjara, khususnya jika mereka berani merusak apa yang telah dijanjikan pemerintah Cina bagi investor asing (Bernardino, 2004: 8).

8 Contoh mengerikan dari kondisi buruh di Cina terlihat di perusahaan Foxconn. Di pabrik milik Taiwan yang terletak di Shenzhen itu, buruh dipaksa bekerja dalam sistem kerja di luar perikemanusiaan. Tempat kerja/tidur yang sempit, udara pengap, tempat peturasan yang berbau menyengat, kerja lebih dari 8 jam dengan pengawasan yang sangat ketat (kamera dimana-mana), hukuman sangat berat bagi buruh yang terlambat dan dengan upah yang rendah, adalah kondisi harian yang harus dihadapi buruh di pabrik itu. Ironisnya, pabrik itu adalah penghasil produk ternohor: Apple, Dell computers dan Hewlett Packard. Tidak mengejutkan jika kasus bunuh diri buruh di pabrik itu akhirnya mengguncang perhatian buruh-buruh Cina yang lain (Wibowo, 2010).

tahun 2003 (Yao, 2005: 92). Angka ini terus bertambah mencapai \$79,1 milyar pada tahun 2005, \$78,1 milyar pada tahun 2006, tahun 2007 sebesar \$138,4 milyar dan telah mencapai \$147,7 milyar pada tahun 2008. Tahun 1995, Cina menjadi negara terbesar kedua penerima FDI setelah Amerika Serikat. Pada tahun 1998, Cina menerima 28% dari aliran FDI di seluruh dunia. Cina menjadi semakin terbuka terhadap FDI dibanding Negara berpendapatan rendah lainnya (Yao, 2005: 90).

Strategi Cina untuk membuka diri terhadap FDI ini bersinggungan dengan keinginan untuk menggenjot Ekspor. Perusahaan-perusahaan swasta asing maupun domestik diarahkan untuk berorientasi ekspor. Pada tahun 2002, 220 ribu perusahaan asing beroperasi di Cina dengan memberi nilai tambah industri sebesar \$ 809 milyar dan nilai ekspor \$ 170 milyar. Sekitar 500 *Transnational Corporation (MNC)* terbesar di dunia versi majalah *Fortunes* ada di Cina<sup>9</sup>. Meskipun beberapa perusahaan asing beroperasi di sektor yang memiliki nilai tambah tinggi bagi industri seperti permobilan, kesehatan, kimia dan elektronik, sebagian besar investasi asing terkonsentrasi pada orientasi ekspor manufaktur yang padat karya, seperti produksi mainan, pakaian, sepatu dan kulit. Perusahaan-perusahaan asing ini memperkerjakan sekitar 23,5 juta buruh yang mewakili 11% angkatan kerja pada tahun 2002 (Bernardino, 2004: 6). Banyak perusahaan asing ini yang dipusatkan di area proses ekspor dan manufaktur dalam wadah KEK, kota terbuka dan pulau Hainan.

Hasilnya, total ekspor meningkat secara dramatis dari \$18.2 milyar pada tahun 1980 menjadi \$194.9 milyar saat tahun 1999. Setelah bergabung dengan *World Trade Organization (WTO)* tahun 2001, ekspor Cina makin meroket. Pada tahun 2003, ekspor total mencapai \$438.4 milyar. Peringkat total ekspor Cina naik dari nomor enam tahun 2001 menjadi peringkat lima di tahun 2002 dan peringkat empat setahun berikutnya. Selain itu, ekspor manufaktur Cina naik signifikan dari 49,9 % pada tahun 1980 menjadi 91,2% pada tahun 2002 (Yao, 2005: 93). Kinerja ekspor Cina ini telah menyamai prestasi Taiwan dan Korea di era 1960 dan 1970-an.

Peran MNC sangat vital dalam melonjaknya ekspor Cina ini (Yao, 2005). Pada awal 1980-an, peran MNC memang dapat diabaikan dengan hanya menyumbang 1-5% dari total ekspor. Namun jumlah ini segera meningkat menjadi \$ 148,8 milyar atau 31,7% dari total ekspor pada tahun 1995. Naik menjadi \$ 249,2 milyar atau 47,9% pada tahun 2000. Sumbangan MNC bahkan telah melebihi separuh dari total ekspor Cina pada tahun 2002 dengan nilai \$ 325,6 milyar atau 52,2% (tabel 1).

---

<sup>9</sup> Pada tahun 2004, 25 MNC telah menempatkan Kantor Pusat Regional mereka di Beijing, diantaranya Motorola, Hewlett-Packard, ABB, Ericsson dan Microsoft. Sementara 137 MNC lainnya telah menempatkan kantor perwakilan mereka di ibukota Cina itu.

Tabel 1. FDI Cina, ekspor dan strukturnya 1980-2003

<i>Tahun</i>	<i>FDI Aktual (\$bn)</i>	<i>Total ekspor (\$bn)</i>	<i>Ekspor oleh investasi perusahaan asing (%) terhadap total ekspor as % of total</i>	<i>Ekspor Manufaktur (%) terhadap total ekspor</i>
1980	0.2	18.2	0.0	49.7
1985	2.0	27.4	1.1	49.4
1986	2.2	30.9	1.6	63.6
1987	2.6	39.4	3.0	66.5
1988	3.7	47.5	5.2	69.7
1989	3.8	52.5	8.3	71.3
1990	3.8	62.1	12.5	74.4
1991	4.7	71.8	16.8	77.5
1992	11.3	85.0	20.4	79.9
1993	27.5	91.8	27.5	81.8
1994	33.8	121.0	28.7	83.7
1995	37.7	148.8	31.7	85.6
1996	41.7	151.1	40.7	85.5
1997	44.2	182.7	40.9	86.9
1998	44.8	183.7	44.0	88.8
1999	40.3	194.9	45.4	89.8
2000	40.7	249.2	47.9	89.8
2001	46.9	266.1	50.1	90.1
2002	52.7	325.6	52.2	91.2
2003	53.5	438.4	n.a.	n.a.

Sumber: Yao (2005: 94)

Upaya memacu pertumbuhan ekonomi dengan cara memperbesar ekspor yang digerakkan oleh investasi asing ini telah membuat Cina mengalami ketergantungan terhadap aliran investasi asing (FDI). Menurut studi Graham & Wada (2002), FDI di Cina secara signifikan telah berkontribusi terhadap pertumbuhan produksi di negara itu. Ini bisa dilihat dari sumbangan provinsi pesisir Cina yang penuh FDI menyumbang pertumbuhan ekonomi lebih tinggi dibanding provinsi pedalaman yang miskin FDI (Graham & Wada, 2002: 14). Tidak pelak, ketika FDI terganggu, pertumbuhan ekonomi juga terganggu. Contoh jelas dari ketergantungan terhadap FDI ini dapat dilihat ketika krisis keuangan tahun 2008 menimpa Cina. Aliran FDI menurun pada enam bulan di masa krisis (November 2008-April 2009). Pada bulan April 2009, aliran FDI ke Cina turun 22,5% dibanding April 2008 yang menyumbang 70,2%. Ini membawa pengaruh signifikan pada perdagangan Cina. Perdagangan Cina pun menurun dalam enam bulan di masa krisis (November 2008-April 2009). Ekspor-impor Cina di bulan Februari 2009 turun 25,7% dan 24,1% dari periode yang sama tahun 2008. Penurunan ekspor Cina bahkan menjadi penurunan bulanan tertinggi yang pernah terjadi (Morrison, 2009: 4). Selanjutnya

pertumbuhan ekonomi juga menurun. Pada tahun 2008, pertumbuhan ekonomi Cina hanya mencapai 9%. Ini merupakan angka terendah dalam tujuh tahun terakhir. Di tahun 2007 saja, pertumbuhan ekonomi Cina masih berada pada level 13%. Sebenarnya pertumbuhan ekonomi Cina pada awal 2008 berjalan lancar dengan tingkat 10% di empat bulan pertama. Namun hantaman krisis keuangan global pada September 2008 telah menekan laju angka pertumbuhan Cina di tiga bulan terakhir 2008 yang tinggal menjadi 6,8% (BBC News, 22/1/2009).

Ketergantungan terhadap FDI telah membuat Cina semakin sulit melepaskan dirinya dari integrasi ekonomi kapitalis dunia. Ini yang menjelaskan mengapa Cina bergabung dengan WTO pada tahun 2001 (Chan, 2003). Tujuan Cina masuk WTO adalah dua sisi dari mata uang sekaligus. Memang para reformis di Cina mengharapkan kompetisi intensif internasional seiring dengan masuknya Cina ke WTO akan mempercepat reformasi perusahaan milik negara yang tidak efisien dan korup (Lin, 2002: 13). Namun demikian, tidak dapat dinafikan jika motif terbesar Cina bergabung dalam WTO adalah untuk menjamin akses ekspor Cina ke pasar-pasar di seluruh dunia disatu sisi, sementara di sisi lain, menarik investasi asing agar lebih besar masuk ke Cina (Chow, 2001: 2). *"By assuring Cina access to the world's major markets, membership in the WTO offers this emerging economy enormous advantages. With that assured access, Cina will become an even more inviting site for foreign direct investors who are focused on export as well as Chinese domestic markets"* (Hughes, 2002: 4). WTO akan memberi kesempatan bagi Cina untuk meningkatkan ekspornya ke pasar global. Selanjutnya, WTO juga akan menjadikan Cina sebagai target yang menarik dari investor internasional yang berorientasi melakukan ekspor dari Cina maupun menjual barang di pasar domestik negeri tersebut (Bader, 2002: 7). Bergabung dengan WTO adalah upaya yang diperlukan untuk melanjutkan pembangunan yang berorientasi pertumbuhan dan memberi toleransi pada kesenjangan.

Bergabungnya Cina ke WTO tentu bukannya akan menguntungkan semua sektor di Cina. Dengan bergabung dengan WTO, Cina harus pertama, menurunkan tarif impor, pada Januari 2004, Cina menurunkan tarif produk pertanian dari 35% menjadi 17%. Kedua, memberi izin bagi perusahaan asing untuk menjual produknya secara langsung dalam pasar domestik Cina. Industri asing, termasuk industri mobil dapat langsung menjual produknya ke pasar Cina tanpa harus melalui organisasi perdagangan Cina. Ketiga, membuka sektor telekomunikasi dan keuangan kepada kompetisi perusahaan asing. Perusahaan asing dapat memiliki kepemilikan hingga 40% pada sektor telekomunikasi dan perbankan (Chow, 2001: 3). Dengan ketentuan seperti ini, sektor yang paling berat terserang adalah para petani dan penduduk di daerah pedalaman yang kurang maju (Hughes, Lin and Turner, 2002: 27; Yue, 2004: 2). Mereka harus bersaing dengan produk pertanian impor dari Eropa

dan Amerika Serikat yang masih disubsidi oleh pemerintahnya. Banjirnya impor produk tersebut tentu akan menekan harga yang pada gilirannya akan menekan pendapatan petani yang sudah rendah.

### **Cina Melihat ACFTA**

Namun bukannya berhenti sampai disini, Cina kemudian justru juga melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan kawasan lain, yaitu ASEAN. Perjanjian ASEAN-China Trade Area (ACFTA) yang disepakati pada tahun 2002 itu telah berlaku efektif sejak Januari 2010 kemarin. Motif resmi Cina membentuk ACFTA adalah untuk memperluas kerjasama ekonomi antara Cina dengan ASEAN, sebagaimana yang disampaikan Presiden Cina Zu Rongji ketika mengusulkan pembentukan ACFTA pada pidato sidang ASEAN 28 November 1999:

*"China will, in accordance with the principle of 'equality and mutual benefit, stress on results, long-term cooperation and common development', expand and deepen its mutually beneficial cooperation with ASEAN countries in various fields, especially in the economic, trade, scientific, technological, agricultural and financial fields" (ASEAN Secretariat, 1999).*

Wakil Perdana Menteri Cina, Li Keqiang beberapa bulan menjelang berlakunya ACFTA lebih spesifik menyatakan motif Cina adalah untuk memfasilitasi pertumbuhan perdagangan dan investasi di kedua belah pihak.

*"CAFTA marks that trade ties between China and ASEAN are to enter a new stage. We should further promote mutual economic and trade cooperation to a deeper level, as well as make joint efforts to boost the liberalization and facilitation of trade and investment. We firmly oppose trade and investment protectionism in any forms, in a purpose to advance global economic recovery and sustainable prosperity (Xinhua, 20/10/2009).*

Di luar pernyataan resmi diplomatis itu, motif Cina untuk membentuk ACFTA secara lebih konkrit dapat dilihat dari kepentingannya untuk memperluas pasar bagi produk-produknya yang terus berkembang pesat. Cina makin menyadari potensi ekonomi ASEAN bagi ekspansi ekspornya. Meskipun harus ditekankan bahwa nilai ekspor Cina ke ASEAN dalam rentang 1980-2000 tidak menunjukkan angka yang besar. Pada era itu, ekspor Cina ke ASEAN-5 (Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, Singapura) rata-rata hanya mencapai 6,4% dari total ekspor Cina ke seluruh dunia pada periode yang sama. Singapura menerima ekspor Cina dengan rata-rata 3,1%; Thailand 0,9%; Malaysia 0,8%; Filipina (0,7%) dan Indonesia hanya 0,6% (Wong&Chan, 2003: 517). Dengan data ini, terlihat bahwa ASEAN mungkin

tidak terlihat sebagai pengganti pasar ekspor utama Cina. Ekspor utama Cina masih diarahkan ke Amerika, Uni Eropa, Jepang dan Korea Selatan. Pada tahun 2001, ASEAN masih menempati peringkat lima dari mitra perdagangan terbesar Cina, setelah Jepang, Amerika, Uni Eropa dan Hongkong. Pada tahun itu, perdagangan Cina dengan ASEAN meningkat menjadi 8,2% dari yang sebelumnya 5,8% pada tahun 1990 (Wong&Chan, 2003: 512).

Ekspor Cina ke ASEAN pada era itu didominasi produk-produk peralatan mesin dan elektronik yang meningkat drastik dari 20,8% di tahun 1993 menjadi 50,9% pada tahun 2001. Sementara komoditas ekspor terbesar kedua ditempati tekstil, pakaian dan alas kaki yang pada tahun 1993 menyumbang 15,7% hingga akhirnya menurun menjadi 10,8% pada tahun 2001. Produk sayur-sayuran juga menjadi salah satu komoditas andalan ekspor Cina ke ASEAN dengan mengambil porsi 11,6% pada tahun 1993.

**Tabel 2. Ekspor Utama Cina ke ASEAN 1993 dan 2001**

Tahun 1993		
Komoditas	Ekspor (\$ milyar)	Proporsi (%)
Peralatan mesin dan elektronik	0,9	20,8
Tekstil, pakaian, alas kaki	0,7	15,7
Produk Sayur-sayuran	0,5	11,6
Logam dasar dan barang logam	0,5	10,6
Produk mineral	0,5	10,5
Subtotal	3,1	69,2
Tahun 2001		
Peralatan mesin dan elektronik	12,1	50,9
Tekstil, pakaian, alas kaki	2,6	10,8
Logam dasar dan barang logam	1,6	6,7
Produk-produk kimia	1,4	6
Produk mineral	1,1	4,6
Subtotal	18,8	79

**Sumber:** Wong&Chan (2003: 515)

Dengan masih kecilnya volume ekspor Cina ke ASEAN yang didominasi komoditas peralatan mesin dan elektronik serta produk tekstil, ekspansi ekspor baik dari segi volume maupun diversifikasi produk adalah pilihan strategis. Maka bagi Cina, ACFTA adalah kunci pintu bagi upaya tersebut. Pasar ASEAN dengan lebih dari setengah milyar penduduknya memiliki potensi bagus bagi ekspansi ekspor Cina.

Selain kepentingan ekspor, mengamankan suplai bahan industri dari ASEAN adalah vital bagi keberlangsungan roda industri Cina yang kian berlari kencang. Pada dekade 1990-an, tepatnya tahun 1993, impor Cina dari ASEAN

didominasi produk-produk bahan baku industri. Produk-produk mineral menempati peringkat pertama dengan mengambil 32,4% dari total impor dengan nilai \$ 1 milyar. Urutan kedua ditempati kayu yang menyumbang 22,6%. Selanjutnya peralatan mesin dan elektronik hanya menempati urutan ketiga dengan 0,6 milyar atau 12,4%. Selebihnya minyak dan lemak binatang atau tumbuhan dan plastik menduduki peringkat keempat dan kelima dengan 8,4% dan 4,4%.

**Tabel 3. Komoditas Impor Utama Cina dari ASEAN**

<b>Tahun 1993</b>		
<b>Komoditas</b>	<b>Ekspor (\$ milyar)</b>	<b>Proporsi (%)</b>
Produk mineral	1,5	32,4
Kayu dan turunannya	1	22,6
Peralatan mesin dan elektronik	0,6	12,4
Minyak dan lemak binatang atau tumbuhan	0,4	8,4
Plastik	0,2	4,4
Subtotal	3,7	80,2
<b>Tahun 2001</b>		
Peralatan mesin dan elektronik	15,2	48,3
Produk mineral	4,4	14,2
Plastik	2,2	6,9
Produk-produk kimia	2,1	6,6
Pulp, Kertas dan karton	1,0	3,3
Subtotal	24,9	79,2

**Sumber:** Wong&Chan (2003: 515)

Komposisi ini segera berubah pada tahun 2001. Pada tahun itu, impor didominasi produk mesin dan elektronik yang pada tahun 1993 hanya menduduki urutan ketiga. Dengan nilai \$ 15,2 milyar atau 48,3%, peralatan mesin dan elektronik menggeser produk mineral yang meskipun meningkat dari tahun 1993 dengan nilai \$ 4,4 milyar, tapi hanya menyumbang 14,2%. Impor kayu bahkan menghilang dari daftar lima besar. Pada tahun 2001, peringkat ketiga dan keempat impor ditempati plastik dan produk kimia dengan porsi 6,9% dan 6,6%. Produk kayu rupanya bertransformasi menjadi produk pulp, kertas dan karton dengan nilai \$ 1 milyar (sama dengan nilai impor kayu tahun 1993) tapi hanya mampu menyumbang 3,3%. Dominanannya impor mesin dan peralatan elektronik dari ASEAN dilakukan oleh MNC di Cina guna memprosesnya kembali sebelum diekspor Amerika maupun Uni Eropa. Meskipun impor Cina dari ASEAN didominasi produk elektronik, tapi produk mineral, pulp sebagai bahan baku industri tetap menjadi kebutuhan utama Cina. Melalui ACFTA, kelancaran produk-produk impor, baik manufaktur maupun non-manufaktur bagi Cina dapat dijamin.

Lancarnya aliran produk-produk ini sangat vital bagi berlangsungnya proses produksi yang digerakkan oleh MNC-MNC di Cina.

### Menengok ASEAN

Sebelum menjelaskan pandangan ASEAN tentang ACFTA, kiranya perlu untuk memahami karakter ASEAN terlebih dahulu. ASEAN (*Association of Southeast Asian Nations*) didirikan pada tanggal 8 Agustus 1967 oleh lima negara: Indonesia, Malaysia, Philippina, Singapura, dan Thailand. Keanggotaan ASEAN terus bertambah seiring perkembangan waktu. Brunei diterima menjadi anggota pada Januari 1984, Vietnam pada 1995, Laos dan Myanmar di tahun 1997. Tiga puluh dua tahun setelah pendiriannya, anggota ASEAN telah meliputi sepuluh Negara di kawasan Asia Tenggara (Tan, 2004: 935). Pendirian ASEAN sendiri tidak bisa dilepaskan dari kondisi geopolitik kawasan pada decade 1960-an. Konflik antar negara di kawasan, campur tangan Amerika di Vietnam dan persaingan serius antara blok Amerika dan Uni Soviet di Asia Tenggara menandai periode 1960-an<sup>10</sup>.

Kombinasi antara perbedaan di berbagai bidang antar-negara Asia Tenggara, kerawanan konflik antar-negara di kawasan, serta persaingan pengaruh blok Amerika dengan Uni Soviet mendorong para pemimpin di lima Negara sepakat mendirikan ASEAN (Poon-Kim, 1977: 753). Organisasi ini mengusung tujuan '*economic growth, social progress, cultural development, [and] peace and stability in the region*'. Meskipun memiliki tujuan kerjasama di berbagai bidang, namun tidak dapat dipungkiri bahwa fokus awal ASEAN lebih menonjol dalam merespon isu keamanan kawasan. Perhatian memang perlu dicurahkan untuk mengurangi antagonism antar-negara di kawasan seiring makin menguatnya polarisasi negara-negara di kawasan akibat perang di Vietnam. Tidak mengejutkan jika urusan ekonomi kurang mendapat perhatian pada masa awal berdirinya ASEAN (Bowles and Maclean, 1996: 321). Ekonomi hanya menjadi isu sekunder di belakang prioritas keamanan kawasan.<sup>11</sup>

10 Konflik perbatasan antara Malaysia dengan Filipina mengenai daerah Sabah serta konfrontasi Indonesia terhadap Malaysia menimbulkan krisis di kawasan. Parahnya, konflik semacam ini ternyata tidak mampu diselesaikan melalui kerangka hubungan bilateral kedua negara. Kondisi ini menimbulkan kesadaran bagi para pemimpin di kawasan bahwa konflik perlu diminimalisir atau diselesaikan melalui kerangka multilateral. Mengingat dua kelembagaan multilateral sebelumnya yaitu Association of Southeast Asia (ASA) dan Maphilindo gagal menjadi media yang efektif penyelesaian sengketa, para pemimpin kawasan perlu membentuk kelembagaan baru (Poon-Kim, 1977: 754).

11 Beberapa pengamat mendukung kesimpulan seperti ini. Mereka umumnya menyatakan bahwa prestasi ASEAN di bidang politik lebih menonjol dibanding bidang lain, terutama kerjasama ekonomi (Imada & Naya, 1992; Kurus, 1993). Imada & Naya menyatakan: 'although ASEAN's accomplishments in the political arena have been significant, its achievements in the area of economic cooperation have been limited' (1992: xi). Pandangan senada juga diungkapkan oleh Kurus (1993: 819): 'a closer examination of its (ASEAN) performance over the past quarter of a century indicates that ASEAN has been far more successful in the diplomatic and political arena than on the economic cooperation front'.

Namun kecenderungan ini mulai berubah seiring dengan perubahan geopolitik kawasan sejak 1975. Runtuhnya rezim non-komunis di Kamboja dan Vietnam Selatan melahirkan kekhawatiran akan meluasnya pengaruh komunis di selatan Malaysia dan Singapura. ASEAN merasa perlu untuk meluaskan kerjasama di luar tujuan awal untuk menghadang laju komunisme (Tan, 2004: 936). Maka pada Bali Summit di tahun 1976, ASEAN menyepakati dua perjanjian ekonomi yaitu 'Treaty of Amity and Cooperation' dan Deklarasi 'ASEAN Concord'. Kedua perjanjian pada dasarnya menekankan perlunya peran aktif kerjasama ekonomi diantara anggota ASEAN, termasuk mengadopsi strategi kawasan bagi pembangunan ekonomi. Menindaklanjuti kesepakatan sebelumnya, ASEAN kemudian sepakat membangun industri bersama guna memenuhi kebutuhan terhadap komoditas dasar melalui 'Preferential Trade Agreement' (PTA) yang diperkenalkan pada tahun 1977. Perjanjian ini merupakan upaya liberalisasi perdagangan dengan menurunkan tariff perdagangan antar-negara ASEAN (Bowles and Maclean, 1996: 321).

Sebelum menjelaskan lebih lanjut kerjasama ekonomi ASEAN, nampaknya perlu untuk lebih dulu menjelaskan karakter strategi pembangunan ekonomi di negara-negara pendiri ASEAN. Pada dasarnya kelima Negara pendiri ASEAN memiliki strategi pembangunan yang relatif tidak berbeda. Kelima Negara itu berusaha membangun ekonomi melalui industrialisasi yang dipimpin oleh negara. Para pemimpin di negara-negara ini mengklaim bahwa mereka tidak peduli pada label ideologi yang akan disematkan pada mereka, baik kiri/sosialis/statist maupun kanan/kapitalis/neoklasik. Mereka sering menyebut strategi pembangunan seperti itu dengan pragmatisme (Austin, 2001). RADIUS Prawiro (1998: 87-88), mantan menteri perdagangan Indonesia menggambarkan strategi itu sebagai berikut:

*"One of the most dramatic shifts in philosophy and style between the New Order and the Old Order was the relinquishing of the extreme, emotion-charged focus on ideology for a more detached, analytical, and flexible approach based on pragmatism. This was particularly true in the formulation of economic*

*policy...-the pendulum of economic policy swung in varying degree between left and right. Their concern was for what worked". .*

Dalam pandangan seperti ini, perbedaan yang ada biasanya hanya pada fase pilihan strategi industrialisasi, antara melalui 'Import-substituting

*Industrialization*' (ISI) atau '*Export-oriented Industrialization*' (EOI).<sup>12</sup> Meski demikian, seperti akan kita lihat nanti, paradigma pembangunan secara umum masih berada dalam kerangka ekonomi *maenstream*. Pertumbuhan ekonomi tinggi menjadi tujuan utama. Pertumbuhan tinggi diharapkan akan menghasilkan '*trickle down effect*' bagi seluruh masyarakat.

Pada tahun 1960-an dan 1970-an, negara-negara ASEAN menjalankan strategi ISI (Bowles, 1997: 223). Selama masa awal kemerdekaan, di bawah Soekarno, Indonesia memulai strategi ISI. Sentimen nasionalisme dan komitmen melindungi industri bayi domestik mewarnai periode ini. Dengan bantuan *oil boom*, Soeharto masih melanjutkan strategi ISI hingga akhir 1970-an (Prawiro, 1998: 153). Berakhirnya *oil boom* menandai akhir pelaksanaan ISI di Indonesia. Filipina juga mulai menjalankan ISI sejak kemerdekaan pada 1946. Untuk melindungi industri dalam negeri, pemerintah memberikan insentif pajak dan memberi perlindungan dari kompetisi perusahaan asing. Strategi ISI relatif berhasil memacu pertumbuhan ekonomi dan memperluas industri manufaktur. Pertumbuhan ekonomi rata-rata mencapai 14% antara 1949 hingga 1953 dan 11% pada periode 1953 – 1959. Namun, kebutuhan akan impor modal dan teknologi untuk melanjutkan strategi ISI telah menghasilkan krisis pembayaran pada tahun 1960 (Kuruville, 1996: 643). Strategi ISI juga segera diadopsi Malaysia setelah kemerdekaannya. Pada fase pertama ISI (1957-1963), Malaysia fokus pada pembangunan infrastruktur dan pedesaan. Industrialisasi masih diserahkan pada pihak swasta. Pada periode kedua (1963-1970), negara mulai memimpin industrialisasi dengan meluncurkan New Economic Policy (NEP) yang menjanjikan kemajuan ekonomi bagi etnis Melayu. Tetangga Malaysia, Singapura, mulai mengadopsi ISI sejak kemerdekaannya pada tahun 1959. Karena kebijakan ISI membutuhkan pasar dalam negeri yang besar, Singapura bergabung dengan federasi Malaya pada tahun 1961. Namun karena alasan perbedaan politik, Singapura memisahkan diri dari federasi pada 1963 (Kuruville, 1996: 639).

Jika ISI menjadi pilihan pada dekade 1960-an dan awal 1970-an, Negara-negara kawasan ASEAN secara umum mulai beralih kepada EOI pada pertengahan 1970-an dan awal 1980-an. Meski demikian, Singapura adalah

---

12 Pada yang disebut pertama, tujuan utama adalah mengembangkan perekonomian dalam negeri dengan membangun industri domestik. Pembangunan industri diharapkan mampu memperbesar produksi, menyediakan bahan dasar bagi proses industri selanjutnya, menyerap tenaga kerja, dan akhirnya menggerakkan perekonomian lebih lanjut. Untuk mencapai tujuan itu, proteksi terhadap industri yang baru lahir dilakukan oleh negara. Biasanya dilakukan pembatasan terhadap FDI dan perdagangan internasional melalui semua skema yang mungkin. Selengkapnya lihat Alexander (1967); Hirschman (1968); Baer (1972). Sementara pada EOI, tujuan utama adalah mempercepat industrialisasi melalui kegiatan ekspor komoditas yang memiliki keunggulan komparatif dibanding negara lain (salah satunya upah buruh). Strategi EOI memerlukan keterbukaan terhadap FDI, perdagangan internasional serta berbagai langkah liberalisasi lainnya. Selengkapnya lihat Nixon (1990). Kedua strategi ini juga tidak *mutually exclusive*. Suatu negara dapat melaksanakan EOI sementara pada saat bersamaan juga menjalankan beberapa elemen ISI, misalnya Cina (Li & Vinten, 1997: 184).

perkecualian. Negara itu telah memulai EOI pada tahun 1965. Kekurangan pasar dalam negeri akibat memisahkan diri dari federasi Malaya memaksa Singapura untuk segera menjalankan strategi EOI dengan pembiayaan dari investor asing. Strategi EOI yang dipelopori negara pada tahun 1965 tersebut pada awalnya fokus untuk menarik investasi asing pada industri radio dan televisi (Kuruvilla, 1996: 639). EOI juga dimulai lebih awal di Malaysia, yaitu pada pertengahan 1970-an. Kebangkrutan akibat program NEP di Malaysia terwujud dalam kegagalan industri berat di negara itu dan justru meningkatkan utang luar negerinya menjadi 30% dari GNP pada 1973-1974. Keadaan ini telah memaksa Malaysia untuk mengubah strateginya dari ISI menjadi EOI dengan meningkatkan ekspor yang berbasis pada industri manufaktur yang dibiayai oleh FDI (Kuruvilla, 1996: 643). Di Indonesia, turunnya harga minyak dunia pada awal 1980-an telah memukul pemasukan Negara yang selama satu dekade sebagian besar bergantung dari minyak. Resesi ekonomi Indonesia di awal 1980-an berhasil memaksa Indonesia membuka perekonomiannya lebih lebar bagi aktor luar (Prawiro, 1998: 217). Deregulasi yang dimulai tahun 1983 menandai bergesernya orientasi ISI ke arah EOI dengan bertumpu pada investasi asing. Kondisi serupa terjadi pada Filipina ketika mereka memulai EOI setelah anjloknya nilai tukar internasional yang kemudian diatasi dengan hadirnya pinjaman dari IMF dan Bank Dunia. Kedua lembaga internasional itu berhasil memastikan Filipina untuk membuka pasar domestiknya bagi investor asing melalui deregulasi yang diadopsi dari strategi EOI (Bello, Kinley and Elinson, 1988).

Selain didorong faktor domestik masing-masing negara, perubahan strategi negara-negara ASEAN ke EOI juga dipengaruhi oleh kondisi ekonomi-politik global. Penurunan ekonomi global pada awal 1980-an, krisis utang internasional dan pengurangan transfer modal dari Utara ke Selatan, meningkatnya sentimen proteksionis di Amerika Serikat dan resesi yang berlanjut pada 1984-1985 setelah pemulihan singkat pada 1982-1983 menandai perubahan fundamental bagi Negara-negara ASEAN. Pada saat bersamaan, lembaga keuangan internasional, IMF dan Bank Dunia menjadi semakin kuat dalam mempengaruhi kebijakan pembangunan ekonomi di negara-negara peminjam. Perkembangan ini telah memaksa ASEAN empat (minus Singapura) menggenjot ekspor mereka dalam rangka menjaga pendapatan dari perdagangan luar negeri (Bowles, 1997: 223).

Tidak bisa dihindari upaya strategi EOI semacam itu membutuhkan peran FDI yang amat besar. Berbagai upaya pun dilakukan negara-negara ASEAN untuk menarik FDI ke Negara mereka. Secara umum, mereka semuanya mendirikan badan khusus yang bertugas untuk mengkoordinasi masuknya investor asing ke negara masing-masing. Indonesia mendirikan Badan Koordinasi Penanaman Modal (BPKM). Badan serupa dibentuk di Malaysia ada Malaysian Industrial Development Authority (MIDA), di Filipina bernama Board of Investment (BOI), di Singapura berupa Economic

Development Board (EDB), dan Office of the Board of Investment (BOI) di Thailand. Semua bentuk organisasi tersebut memiliki tujuan yang sama: menarik investasi asing dengan berbagai cara (Yeung, 1997: 8). Deregulasi dan liberalisasi arus modal juga menjadi tema umum untuk menarik investor (Tang, 2000: 99).

Negara-negara pendiri ASEAN rajin membangun infrastruktur dan mempermudah pelayanan agar dilirik investor. Di Singapura, mereka mulai membangun infrastruktur (transportasi, komunikasi, kawasan khusus dan zona pengolahan ekspor). Singapura juga memberikan insentif keuangan kepada perusahaan seperti pembebasan pajak dan subsidi ekspor (Kuruville, 1996: 639). Filipina mendirikan zona pengolahan ekspor di Bataan dan Mariveles. Pemerintah juga melonggarkan kendali perdagangan disamping memperbanyak jumlah pinjaman asing untuk mereformasi pendidikan, industri, sistem keuangan, penyederhanaan tariff, yang semuanya ditujukan bagi upaya menarik investor asing (Kuruville, 1996: 646). Thailand bekerja keras membangun jalan, pelabuhan, instalasi listrik maupun suplai air bagi sektor industri. Pemerintah Thailand juga menyediakan insentif pajak dan memperbaiki prosedur pelayanan birokrasi bagi investor asing (Hussey, 1993: 17). Indonesia, Malaysia, dan Singapura pada 1989 mendirikan kawasan bebas 'segitiga emas' yang bernama SIJORI (Singapura-Johor-Riau).

Selain memberikan berbagai fasilitas diatas pada calon investor asing, negara-negara ASEAN juga berlomba-lomba menciptakan iklim yang kondusif. Tentu saja salah satu syarat utama adalah stabilitas politik. Untuk kepentingan ini, tidak segan para pemimpin ASEAN menerapkan tindakan represif terhadap pekerja industri yang berpotensi menimbulkan gejolak. Di Indonesia, Soeharto menyatukan seluruh pekerja pada satu serikat buruh tunggal. Hubungan industrial juga dipayungi dengan istilah ideologis, yaitu 'Hubungan Industrial Pancasila' agar selalu tercipta harmoni (Hadiz, 1997). Di Malaysia, pelarangan ditujukan pada tiap aktivitas pemogokan dan pembatasan terhadap pelaksanaan fungsi serikat pekerja yang sesungguhnya. Pemerintah Malaysia mengontrol penuh gerakan buruh (Kuruville, 1996: 643). Singapura membentuk lembaga tripartit untuk memastikan stabilitas produksi. Unionisme serikat pekerja dibentuk dan dibiayai negara untuk memastikan loyalitas mereka pada pemerintah (Kuruville, 1996: 640). Hal yang sama juga dilakukan di Thailand (Tang, 2000: 99; Hussey, 1993: 17). Memang tidak bisa dipungkiri bahwa strategi pembangunan EOI memerlukan pelayanan yang memuaskan terhadap investor asing berupa '*..stable, cheap, and flexible industrial relations system*' (Chiang, 1988:239).

Upaya menarik FDI nampak berhasil di negara-negara ASEAN. Seperti terlihat pada table 4, setelah menurun pada awal 1980-an akibat resesi, FDI ke ASEAN terus meningkat pada paruh kedua 1980-an dan awal 1990-an.

Tabel 4. Aliran FDI ke ASEAN 5 (dalam juta dollar)

Tahun	Indonesia	Malaysia	Thailand	Filipina	Singapura	ASEAN 5 Total
1961-1980	2,163	4,453	1,186	452	3,728	11,982
1981	133	1,265	288	172	1,675	3,533
1982	225	1,397	189	16	1,298	3,125
1983	292	1,261	348	105	1,085	3,091
1984	222	797	400	9	1,210	2,638
1985	310	695	162	12	809	1,988
1986	258	489	261	127	1,533	2,668
1987	385	423	182	307	2,696	3,993
1988	576	719	1,082	936	2,710	6,023
1989	682	1,846	1,727	563	3,963	8,781
1990	964	2,958	2,236	530	4,489	11,177
1981-1990	4,047	11,850	6,875	2,777	21,468	47,017

Sumber: Hart-Landsberg & Burkett (1998: 90)

Di Thailand, antara 1985-1990, sebagian besar investasi asing tersebut terlibat dalam proyek yang 80% - 100% produk yang dihasilkannya diekspor (Hussey, 1993: 16-17). Masuknya investasi asing telah menggerakkan laju pertumbuhan ekonomi Thailand secara signifikan. Selama periode boom ekonomi 1988-1992, Thailand menikmati pertumbuhan ekonomi dua digit. Pada tahun 1988, mereka tumbuh 13%. Setahun berikutnya, 1989 Thailand masih tumbuh 12,3% dan 1990 tumbuh 11,5% (Tang, 2000: 99). Gambaran pertumbuhan serupa juga terjadi di Indonesia, Malaysia (Hill, 1994) dan belakangan Vietnam.

Perkembangan pada 1980-an telah membuat ASEAN semakin tergantung pada aliran FDI. Antara 1985-1990, sumbangan FDI terhadap GDP meningkat dari 0,6 % menjadi 2,4 dan bahkan mencapai 7,1% pada tahun 1990 (Bowles, 1997: 222). Ketergantungan semacam itu menghasilkan kekhawatiran pemimpin negara-negara ASEAN terhadap potensi hengkangnya FDI dari ASEAN ke kawasan lain ketika muncul perkembangan baru pada awal 1990-an. Tantangan terhadap perebutan aliran FDI dari kawasan lain semakin nyata. Cina, kawasan bekas Uni Soviet setelah runtuh 1989-1991, integrasi Eropa pada 1992 dan pembentukan North American Free Trade Area (NAFTA), khususnya peluang pengalihan FDI dunia ke Meksiko, menjadi perhatian serius para pemimpin ASEAN (Bowles, 1997: 223-224). Kekhawatiran ini misalnya terlihat jelas dari pernyataan PM Singapura, Goh Chok Tong:

*"...unless ASEAN can match the other regions in attractiveness both as a base for investments and as a market for their products, investments by multinational companies are likely to flow away from our part of the world to the S[ingle] E[uropean] M[arket] and NAFTA" (cq. Bowles, 1997: 224).*

Pemimpin ASEAN merasa perlu untuk merespon secara kolektif perkembangan yang terjadi. Ini bisa dipahami mengingat jika kita lihat, respon terhadap kondisi ekonomi-politik pada masa 1980-an lebih menunjukkan

aksi individual masing-masing Negara di kawasan, daripada sebuah upaya kolektif ASEAN untuk merespon kondisi global (Bowles, 1997: 222). Oleh karena itu, para pemimpin ASEAN berkomitmen mengadakan aksi kolektif untuk merespon perkembangan baru di awal 1990-an. Mereka semua sepakat bahwa kebijakan bersama ASEAN yang kondusif bagi promosi ekspor (EOI) perlu segera dilaksanakan.

Inisiasi para pemimpin ASEAN ini nampaknya mendapat dorongan lebih kuat jika melihat fakta perdagangan intra ASEAN pada dekade 1980-an. Pada masa ini, meski perdagangan intra ASEAN menurun, namun terjadi perubahan komposisi produk perdagangan secara signifikan (Bowles, 1997: 223). Pada tahun 1980, perdagangan manufaktur intra ASEAN hanya sebesar 28,2% dari total perdagangan. Namun angka ini telah meningkat hampir tiga kali lipat menjadi 61,3% pada tahun 1990. Peningkatan perdagangan manufaktur ini tidak diragukan lagi merupakan dampak dari aktivitas yang dilakukan oleh MNC di kawasan ASEAN.

Perdagangan intra-jaringan MNC di kawasan ASEAN dapat dilihat dalam kasus salah satu perusahaan elektronik raksasa Jepang: Fujitsu<sup>13</sup>. Fujitsu mendirikan pabriknya di Asia Tenggara pada tahun 1988 di Thailand. Seluruh produksi Fujitsu menyumbang 12% pada pasar HDD dunia. Dari jumlah itu, separuhnya diproduksi di Thailand. Pabrik di Thailand hanya berfungsi sebagai perakitan produk dan tidak memiliki fungsi lain. Seluruh fungsi pemasaran dan penjualan dilakukan oleh Kepala Wilayah yang berada di Singapura. Sementara keseluruhan strategi Research and Development (R&D) dilakukan oleh induk Fujitsu di Tokyo. Selain Thailand, Fujitsu juga membangun pabrik penunjangnya di negara lain di Asia Tenggara, seperti Filipina, Malaysia, dan Vietnam. Operasional di Thailand bergantung pada input produksi yang disediakan oleh cabang di Filipina, Vietnam juga Singapura. Fujitsu di Jepang juga menyokong input bagi perakitan di Thailand. Keseluruhan produksi kemudian dijual keseluruh dunia, dimana hanya 10% diantaranya yang dijual di pasar ASEAN (Mirza & Giroud, 003: 14-15). Aliran input dan output produksi Fujitsu antar-negara seperti inilah yang mendorong peningkatan perdagangan manufaktur di kawasan ASEAN.

Dengan menyadari fakta makin terhubungnya negara satu dengan negara lain di kawasan akibat aktivitas jaringan MNC, para pemimpin ASEAN percaya bahwa penyatuan ekonomi kawasan akan sangat menarik bagi investor asing untuk memperbesar aliran modalnya. Penyatuan ekonomi kawasan ASEAN paling tidak akan memberi dua keuntungan sekaligus

---

13 Fujitsu merupakan MNC yang bergerak di bidang informasi teknologi dan juga elektronik. Didirikan di Jepang pada tahun 1935. Pada tahun 2009, Fujitsu mempekerjakan sekitar 185 ribu karyawan di seluruh dunia. Cabang Fujitsu tersebar di sekitar 70 negara. Kini Fujitsu menjadi perusahaan penyedia jasa informasi dan teknologi terbesar di Jepang dan terbesar ketiga di dunia.

pada MNC (Bowles, 1997: 229-230). Pertama berkenaan dengan harapan bahwa AFTA melalui penghapusan benteng-benteng tariff domestiknya, akan memperluas pasar regional bagi produksi dan konsumsi MNC. Keuntungan kedua terkait dengan peningkatan kredibilitas neara-negara ASEAN di mata MNC. AFTA akan menunjukkan komitmen ASEAN dalam menjamin kelancaran usaha MNC di kawasan tersebut yang berarti memperkecil resiko berusaha. Dengan keuntungan bagi MNC seperti itu, penyatuan ekonomi kawasan adalah senjata andalan bagi ASEAN untuk menarik investasi asing ke dalam pangkuannya. Mengutip Bowles (1997: 223): *“the ASEAN countries as a group can offer investors ... a combination [of advantages] that no member individually possesses.*

Perkembangan ini telah menjadi alasan kuat bagi para pemimpin di Indonesia, Malaysia, Thailand, dan Filipina untuk membentuk AFTA (*ASEAN Free Trade Agreement*) pada tahun 1993. Pada Januari 1993, enam anggota ASEAN Brunei, Indonesia, Malaysia, the Filipina, Singapura, dan Thailand sepakat menandatangani AFTA. Dalam perjanjian ini, tarif pada semua barang manufaktur (dengan bahan paling tidak 40% berasal dari ASEAN) akan dikurangi hingga menjadi 0-5 persen pada 15 tahun mendatang (tahun 2008). Mekanisme untuk mengurangi pengurangan tariff tersebut dilakukan melalui skema Common Effective Preferential Tariff. Lima belas kelompok produk yang meliputi sekitar 40% perdagangan intra ASEAN akan dikenakan skema ini. Namun setelah pertemuan Menteri Ekonomi ASEAN pada September 1994, target waktu pelaksanaan dipercepat menjadi sepuluh tahun saja (2003) dan produk pertanian yang dulu tidak akan dimasukkan dalam skema pengurangan tarif, kini juga akan diikutsertakan. Artinya, AFTA akan meliputi seluruh produk perdagangan intra ASEAN (Bowles and Maclean, 1996: 319-320).

Tidak berlebihan tampaknya jika disini dinyatakan bahwa terbentuknya AFTA menunjukkan betapa kepentingan MNC di kawasan menjadi perhatian serius pemimpin ASEAN dalam membentuk AFTA. Kawasan perdagangan bebas kawasan dalam rangka menghapus batas-batas nasional dan menyatukan mereka semua dalam satu jaringan perusahaan<sup>14</sup> menjadi penting untuk memenuhi skala ekonomi keuntungan. Hidetaka Yoshimatsu (2002: 129), pengamat terkemuka MNC di Asia Tenggara mengatakan:

*“...the introduction and development of regional economics arrangement in the ASEAN countries is influenced by particular preferences of some foreign*

14 *“The network form of governance in international business may be interpreted as the organizational forms and processes through which transnational activities are directed across different fields and geographic locations. The patterns and character of the connections among various relations in networks constitute their structures, because “such structures are conditioned by technical and cultural factors, but, primarily, they are interactive, that is, they are formed and modified through interaction among the actors. The network structure is a result of History”.* Selengkapnya lihat Yeung (1997: 4)

*MNCs. These MNCs are likely to raise their preferences for preferential economic arrangements, as they need more scale economies by broadening the targeted markets of their intermediate and final products. These preferences and demands induce the states concerned to launch and develop an arrangement for regional economic cooperation”.*

### Perspektif ASEAN terhadap ACFTA

Seperti yang telah dilihat, komitmen pembentukan AFTA cukup sukses menarik FDI ke ASEAN (Arnold, 2006). Aliran FDI ke ASEAN memang meningkat drastik dari \$ 24 milyar tahun 1980 menjadi \$ 232,6 milyar pada tahun 1998, atau meningkat hampir 10 kali lipat. ASEAN menerima 34,5% total FDI di kawasan Asia Timur, Selatan dan Tenggara. Dari total FDI di Asia, ASEAN menikmati 31,4%. Dan dari seluruh FDI yang ada di negara berkembang, ASEAN menerima 18,7%. Sebagian besar (sekitar 88%) FDI ini diserap oleh Singapura, Indonesia, Malaysia dan Thailand (Piei, 2005: 109). Aliran FDI itu sebagian besar berasal dari Amerika, Eropa, dan Jepang. Mereka bersama-sama berkontribusi terhadap 60% FDI di ASEAN. Cina sendiri hanya menempati peringkat kelima dalam kontribusi FDI ke ASEAN. Pada tahun 1997, Cina hanya menyumbang tidak lebih dari 1% FDI di ASEAN seperti terlihat pada tabel 5.

Tabel 5. Aliran FDI ke ASEAN berdasarkan negara asal

	1995 (%)	1996	1997	1998	1999	1995-2000
USA	14.4	15.0	9.3	12.2	15.4	12.9
Europe	23.5	30.0	22.4	23.5	33.2	26.2
Japan	19.5	19.6	21.0	13.2	5.4	15.7
Korea	2.3	2.1	2.9	4.6	2.8	2.8
Cina	0.6	0.4	0.2	1.5	0.8	0.7
Total (billion US\$)	21.3	26.0	28.1	19.6	16.9	112.6

Sumber: Piei (2005: 110)

Namun sejak krisis keuangan 1997/1998, kontribusi tiga negara Asia Timur (Jepang, Korea Selatan dan Cina) terhadap FDI ASEAN berkurang dari total 24,1% di tahun 1997 menjadi tinggal 9% pada tahun 1999 (Piei, 2005: 109). FDI dari Jepang menurun drastik dari 21% pada tahun 1997 menjadi 5,4% pada tahun 1999. Sebaliknya, modal dari Amerika dan Eropa makin mengokohkan diri sebagai sumber FDI utama bagi ASEAN. Amerika dan Eropa meningkatkan porsi FDI mereka dari 14% dan 23% pada tahun 1995 menjadi 30% dan 40% pada tahun 2001. Ini menunjukkan bahwa Amerika dan Eropa mengambil keuntungan dari krisis keuangan Asia yang mendorong bangkrutnya bank-bank Jepang. Modal Amerika dan Eropa kemudian mengambil alih dan mengontrol bank-bank dan perusahaan industri utama dalam harga yang rendah (Bernardino, 2004: 6).

Menurunnya kontribusi negara Asia Timur dan naiknya pengaruh modal Amerika dan Eropa mendorong ASEAN untuk kembali meningkatkan aliran FDI dari Asia Timur yang sempat menurun. Termasuk berupaya mendorong Cina meningkatkan aliran FDI-nya ke ASEAN. Dengan menyepakati ACFTA, ASEAN berharap dapat meningkatkan aliran FDI dari Cina yang sebelum perjanjian ditandatangani tahun 2002, masih sangat kecil. Seperti seorang pengamat berkomentar:

*"In the FTA with Cina, ASEAN's wish is to ride on the Chinese economic express train with the objective of reattracting foreign direct investments (FDI) and hopefully redirect into the region the huge amounts of FDI flowing into Cina. It also looks at Cina as its future primary export market, supplying energy raw materials and electronic and machinery parts to Chinese-based plants. The ASEAN-Cina FTA, is hence viewed by ASEAN as a needed boost to recover from the debilitating effects of the 1997 Asian financial crisis"* (Bernardino, 2004: 5-6).

Selain mengharapkan aliran FDI dari Cina, ASEAN juga melihat potensi perdagangan dengan Cina. Berdasarkan perkiraan para ahli gabungan ASEAN, ACFTA akan berkontribusi pada pertumbuhan GDP ASEAN sebesar 0,9% dan 0,3% bagi Cina. Selanjutnya, volume ekspor Cina ke ASEAN dikatakan akan naik sekitar 55% dan ekspor ASEAN ke Cina meningkat 48%. Jika berhasil, ACFTA akan menjadi area perdagangan bebas terbesar di dunia dengan penduduk mencapai 1,8 milyar manusia, dengan total GDP mencapai \$ 2 triliun dan total perdagangan sebesar \$ 1,5 triliun (Bernardino, 2004: 3). Upaya ASEAN untuk meningkatkan ekspor ke Cina tidak lepas dari krisis keuangan Asia 1997/1998 yang membelit perekonomian negara-negara ASEAN. Bagi Asia secara keseluruhan, tahun 2003 dan 2004 seperti dinyatakan oleh UNCTAD: *"China was a major engine of growth for most of the economies in the region. The country's imports accelerated even more than its exports, with a large proportion of them coming from the rest of Asi."* (Bello, 2010). Tidak mengejutkan jika Presiden Filipina, Gloria Macapagal-Arroyo, menyatakan bahwa ACFTA adalah 'kerjasama regional luar biasa' yang dapat menyaingi Amerika dan Uni Eropa (Bello, 2010).

Kondisi diatas dipadu dengan masih rendahnya ekspor ASEAN ke Cina dalam dua dekade terakhir menjadi pendorong bagi peningkatan ekspor ASEAN ke Cina. Pada periode tersebut, ekspor lima negara besar di ASEAN rata-rata hanya sebesar 5,5%. Singapura hanya mengekspor 2,2% produknya ke Cina, Thailand 2,7%; Indonesia 2,5%; Malaysia 2% dan Filipina hanya 1,3% (Wong&Chan, 2003: 517). Memang pada tahun 2000, proporsi ekspor ke Cina telah mencapai 9,8% dari total ekspor ASEAN. Namun angka ini tentu masih sangat kecil jika dibandingkan dengan ekspor ASEAN ke Amerika, Jepang, maupun Uni Eropa.

Pada dekade 1990-an ini, komoditas ekspor utama ASEAN ke Cina didominasi bahan-bahan primer (mentah) yang miskin nilai tambah (tabel 3). Komoditas terbesar yang diekspor adalah bahan mineral yang pada tahun 1993 mencapai 32,4% dari total ekspor ASEAN dengan nilai \$ 1,5 milyar. Selain mineral, kayu adalah komoditas unggulan ASEAN ke Cina. Pada tahun 1993, ekspor kayu merupakan 22,6% dari total ekspor ASEAN dengan nilai \$ 1 milyar. Komoditas manufaktur berupa peralatan mesin dan elektronik baru menempati peringkat ketiga dengan mengambil proporsi 12,4% atau sebesar \$ 0,6 milyar. Sementara minyak dan lemak binatang atau tumbuhan dan plastik mengambil bagian masing-masing 8,4% dan 4,4% (Wong&Chan, 2003: 515).

Komposisi ekspor ASEAN mulai berubah memasuki awal millennium baru. Pada tahun 2001, ekspor terbesar ASEAN ke Cina adalah peralatan mesin dan elektronik yang menyita bagian sebesar 48,3% dengan total nilai \$ 15,2 milyar. Namun produk mineral tetap memiliki porsi besar dalam ekspor, yaitu 14,2% dengan nilai \$ 4,4 milyar. Selebihnya, komoditas seperti plastik, produk kimia dan pulp, kertas dan karton berturut-turut menyumbang 6,9%; 6,6%; dan 3,3% (Wong&Chan, 2003: 515). Bersama-sama, kelima komoditas ini menyumbang sekitar 80% dari total ekspor ASEAN ke Cina. Berubahnya komposisi ekspor yang telah didominasi peralatan mesin dan elektronik, - tidak lagi bahan mentah yang miskin nilai tambah-, berkat ekspansi investasi asing yang digerakkan oleh MNC. Melalui ACFTA, ASEAN nampaknya ingin memperbesar ekspor manufakturnya ke Cina, yang sebagian besar dilakukan MNC di negara bersangkutan. Selain itu, tentu saja ASEAN berupaya meluaskan jenis komoditas non-manufaktur yang akan makin bebas hambatan pasca diberlakukannya *Early Harvest Program*.

Ekspor hanyalah satu sisi dari perdagangan, dan ASEAN ternyata juga mengharapkan impor produk dari Cina. Dari tahun 1980-2000, impor dari Cina rata-rata tidak lebih dari 4%. Dari seluruh impor Singapura, impor dari Cina hanya sebesar 4%; Thailand dan Indonesia sama-sama hanya mengimpor 3% dari Cina. Sementara Malaysia dan Filipina masing-masing juga hanya mengimpor 2,5% dari total impor mereka (Wong&Chan, 2003: 517). Namun nilai ini jika dibandingkan proporsi ekspor ASEAN ke Cina akan terlihat lebih besar.

Impor ASEAN dari Cina didominasi produk peralatan mesin dan elektronik (table 2). Pada tahun 1993, komoditas ini menguasai impor dengan proporsi 20,8%, baru diikuti produk tekstil, pakaian, dan alas kaki sebesar 15,7%; sayur-sayuran 11,6% dan logam dasar dan barang logam 10,6%. Komposisi ini sedikit berubah pada tahun 2001. Namun urutan pertama impor tetap didominasi produk mesin dan elektronik yang justru kian naik menjadi 50,9% dengan nilai 12,1 atau meningkat 12 kali lipat dari tahun 1993. Komoditas tekstil, pakaian dan alas kaki juga masih menduduki peringkat kedua dengan 10,8%, baru diikuti produk logam, kimia, dan mineral yang

masing-masing di urutan ketiga, keempat, dan kelima dengan 6,7%; 6%; dan 4,6%. Komposisi ini menunjukkan bahwa mesin dan tekstil menjadi komoditas penting bagi impor ASEAN dan ACFTA dapat menjadi sarana untuk meningkatkan dan memperlancar arus komoditas tersebut. Meskipun juga tidak dapat dinafikan kepentingan ASEAN untuk impor produk-produk non-manufaktur yang lebih murah dari Cina.

### **Komitmen ACFTA: Saling Melengkapi atau Kompetisi?**

Sejak ACFTA disepakati dan *Early Harvest Program* (EHP) dijalankan pada tahun 2004, persetujuan Jasa ACFTA ditandatangani pada 2007 dan Persetujuan Investasi ASEAN-Cina disepakati pada tahun 2009, indikator-indikator makro yang diinginkan memang berubah. Aliran FDI antar kawasan relatif meningkat. Investasi Cina ke ASEAN pada tahun 2004 berjumlah \$ 1,5 milyar atau 4,3% dari seluruh FDI di ASEAN. Prosentase ini meningkat dari sebelumnya yang hanya 0,7% di tahun 2000. Angka ini sempat menurun menjadi 1,5% atau \$ 0,6 milyar pada tahun 2005 (Jianglin, 2007). Namun kembali naik dengan menyumbang \$ 1,02 milyar pada tahun 2006. Pada tahun 2007, aliran FDI dari Cina ke ASEAN naik ke angka \$ 1,57 milyar meskipun turun lagi di tahun 2007 menjadi \$ 1,44 milyar (ASEAN Investment Report, 2009: 11). FDI sedikit meningkat menjadi \$ 2.3 milyar pada tahun 2009 (People Daily, 25/2/2010). Namun angka ini secara spektakuler meningkat lima kali lipat menjadi \$ 10 milyar pada tahun 2010 ini.<sup>15</sup> Seperti yang dinyatakan oleh Sekretariat ASEAN, investasi sebesar itu diluncurkan pada bulan Januari 2010 pasca berlaku efektifnya ACFTA. Dana ini merupakan investasi untuk membangun infrastruktur: jalan, rel kereta api, penerbangan, dan telekomunikasi informasi yang akan menghubungkan Cina dengan ASEAN. Cina juga menyediakan fasilitas kredit sebesar \$ 15 milyar untuk mendorong integrasi dan keterkaitan regional (ASEAN Secretariat, 2010).

Meski demikian, secara umum aliran FDI Cina ke ASEAN tidaklah terlalu signifikan. Pada tahun 2006, Cina hanya menempati urutan kesepuluh dari pengekspor FDI terbesar ke ASEAN. Sempat membaik ke peringkat delapan pada tahun 2007, Cina kembali turun ke posisi sembilan besar dalam mengalirkan FDI ke ASEAN (ASEAN Investment Report, 2009: 11). Cina masih kalah jauh dibanding Uni Eropa, Jepang, Amerika, atau bahkan dari

<sup>15</sup> Peningkatan ini dapat diduga didorong oleh persetujuan Investasi ASEAN Cina yang ditandatangani pada saat pertemuan ke-41 Tingkat Menteri Ekonomi ASEAN tanggal 15 Agustus 2009 di Bangkok, Thailand. Persetujuan Investasi ASEAN-Cina memberikan berbagai kemudahan investasi: (i) jaminan perlakuan yang sama untuk penanam modal asal Cina ataupun ASEAN antara lain dalam hal manajemen, operasi, likuidasi; (ii) pedoman yang jelas mengenai ekspropriasi, kompensasi kerugian dan transfer serta repatriasi keuntungan; (iii) kesetaraan untuk perlindungan investasi dalam hal prosedur hukum dan administratif. Apabila terjadi sengketa yang muncul antar investor dan salah satu pihak, persetujuan ini memberikan mekanisme penyelesaian yang spesifik disamping adanya kesepakatan semua pihak untuk terus berupaya menjamin perlakuan yang sama atau non-diskriminatif.

ASEAN sendiri, terutama FDI yang dialirkan oleh Singapura dan Malaysia. Gambaran ini memperlihatkan bahwa Cina masih merupakan pemain kecil dalam menyalurkan FDI. Investasi dari Cina tidak lebih dari 1% terhadap total FDI di dunia (Davies, 2009: 2). Pada tahun 2007, investasi yang keluar dari Cina hanya 3% dari GDP. Jauh dari penerimaan FDI di Cina yang mencapai 10% dari GDP (Pananond, 2008: 24). Artinya, Cina masih menjadi negara yang tergantung pada FDI daripada pengekspor FDI.

Kondisi ini makin dipertegas dengan melihat aliran FDI ASEAN ke Cina yang ternyata sedikit lebih tinggi daripada aliran FDI Cina ke ASEAN. Dari tahun 2004-2006, rata-rata aliran FDI ke Cina ke ASEAN hanya mencapai \$ 1,4 milyar. Sebaliknya, FDI ASEAN ke Cina tiga kali lebih besar dengan nilai rata-rata 3,16 milyar di periode yang sama. Aliran FDI tertinggi terjadi pada tahun 1998 ketika \$ 4,18 milyar digelontorkan ke Cina dari ASEAN. Angka ini merupakan 9,2% dari seluruh FDI yang ada di Cina (Jianglin, 2007). Aliran FDI masih relatif tinggi pada beberapa tahun berikutnya meskipun menunjukkan kecenderungan menurun dari tahun 1999 \$ 3,31 milyar (8,2%); tahun 2000 menjadi \$ 2,85 milyar (7%); \$ 3,6 milyar (6,2%) di tahun 2002 dan \$ 3,11 milyar (5,1%) di tahun 2005. Pada tahun 2006, nilai investasi naik menjadi 3,35 milyar (hampir sama dengan nilai di tahun 1999 yang menyumbang 8%), tapi kali ini nilai itu hanya mampu menyumbang 5,3% dari total investasi di Cina. Pengekspor FDI terbesar dari ASEAN adalah Singapura dan Malaysia. Pada tahun 2007, kedua negara itu menyumbang 85% dari total FDI yang keluar dari ASEAN (Pananond, 2008: 9). Tapi tentu saja aliran FDI ASEAN ke Cina sangatlah tidak signifikan. Aliran FDI dari Hongkong, Taiwan, Uni Eropa, Amerika, Jepang masih menjadi sumber utama FDI bagi Cina.

Pola aliran FDI di atas menggambarkan bahwa harapan ASEAN maupun Cina untuk meningkatkan aliran FDI satu sama lain melalui ACFTA adalah terlalu dini. Kedua kawasan itu masih merupakan pemain yang mengharapkan FDI daripada mengekspor FDI. Kedua kawasan itu akan lebih banyak bersaing memperebutkan FDI dari Uni Eropa, Jepang, Hongkong, Amerika, daripada mengalirkan FDI asli dari masing-masing pihak. Kalaupun terjadi aliran dari Cina atau ASEAN, itu merupakan aliran FDI yang sebelumnya diterima dari kawasan pengekspor FDI utama seperti keempat kawasan yang disebut di depan. Contohnya adalah Singapura, penerima terbesar FDI di ASEAN, sekaligus pengekspor terbesar FDI dari ASEAN. FDI nampak hanya sebentar mampu di titik tertentu (Singapura) sebelum dialirkan ke bagian jaringan modal yang lain. Cina dan ASEAN merupakan unit-unit jaringan yang berfungsi sebagai penerima modal.

Selain tren aliran FDI yang naik, perdagangan Cina dengan ASEAN sebenarnya juga meningkat drastis. Pada tahun 2003, total perdagangan kedua pihak bernilai \$ 78,2 milyar dan mencapai \$ 100 milyar pada tahun berikutnya. Angka ini terus meroket menjadi \$ 202,6 milyar pada tahun 2007 dan \$ 213

milyar pada tahun 2009 (People Daily, 25/2/2010). Angka terakhir adalah rekor tersendiri karena untuk pertamakalinya perdagangan dua kawasan melebihi \$ 200 milyar. Pertumbuhan perdagangan kedua kawasan mencapai rata-rata 21,9% per tahun. Pada tahun 2007, total perdagangan dengan ASEAN telah mencapai 9,3% dari seluruh perdagangan Cina. Sebaliknya, nilai perdagangan dengan Cina telah mencapai 9,8% dari total perdagangan ASEAN pada tahun 2006 (Jianglin, 2007). Pada tahun 2008, perdagangan dengan Cina berkontribusi terhadap 11,3% dari total perdagangan ASEAN di tahun 2008 dengan nilai \$ 192.6 milyar (ASEAN Secretariat, 2010). Di tahun 2008 itu, Cina menjadi mitra ketiga terbesar perdagangan ASEAN. Sementara ASEAN menjadi mitra perdagangan terbesar keempat bagi Cina. Perdagangan antara ASEAN dan Cina antara 2003 hingga 2008 meningkat rata-rata 26% per tahun. Selanjutnya hingga bulan Mei 2010, total perdagangan ASEAN-Cina telah mencapai \$ 62,909 milyar, naik 60% dari periode yang sama di tahun 2009 (Ministry of Commerce PRC, 2010a).

Jika dilihat lebih dekat, komposisi hubungan ekspor-impor Cina dan ASEAN menunjukkan nilai defisit bagi pihak Cina. Ekspor Cina ke ASEAN meningkat dari \$ 12,7 milyar di tahun 1997 menjadi \$71.3 pada tahun 2006. Sebaliknya ekspor ASEAN ke Cina meningkat dari \$ 12,4 milyar di tahun 1997 menjadi \$ 89,538 milyar di tahun 2006 (Asia Times, 17/12/2008). Angka ini meningkat terus pada 2009, dimana ekspor Cina ke ASEAN sebesar \$ 82,412 milyar dan sebaliknya dari ASEAN ke Cina sebesar \$ 83,352 milyar. Kecenderungan meningkat terus terjadi pada tahun 2010. Sampai dengan bulan Mei 2010, ekspor Cina ke ASEAN telah mencapai \$ 29,228 milyar dan \$ 33,681 milyar untuk ekspor ASEAN ke Cina (Ministry of Commerce PRC, 2010b). Nilai itu naik masing-masing 46% dan 77% pada periode yang sama tahun 2009.

Secara umum komoditas yang mendominasi perdagangan kedua kawasan adalah produk elektronik dan kelistrikan, bahan bakar, plastik, batubara, dan minyak sawit (ASEAN Secretariat, 2010). Tidak banyak berubah dari tahun 2001, peralatan mesin dan elektronik menjadi komoditas dominan dari ekspor-impor ASEAN-Cina. Seperti yang terlihat di tabel 2 dan 3 dengan uraian di depan, sejak awal tahun 2000-an, ekspor-impor Cina-ASEAN didominasi peralatan mesin dan elektronik. Komposisi ini ternyata tidak berubah pada tahun 2008. Pada tahun itu, ekspor ASEAN didominasi oleh peralatan mesin dan elektronik yang menyita bagian 23,4% dengan nilai \$ 175,5 milyar. Pada tahun yang sama, ekspor peralatan mesin dan elektronik Cina ke ASEAN mencapai 342,1 milyar atau sekitar 23,9% dari total ekspornya. Ekspor reaktor nuklir, mesin uap, mesin dan elektronik adalah produk terbesar dari ekspor baik Cina maupun ASEAN (Chaw&Wang, 2010).

Lalu apa yang diharapkan Cina dan ASEAN terhadap struktur perdagangan seperti ini? Apa keuntungan dari pola perdagangan dengan

melibatkan komoditas yang sama? Untuk menjawab pertanyaan ini, nampaknya kita perlu melihat karakter perekonomian kontemporer. Seperti yang diungkapkan Castells (2010), selain bersifat informatif dan global, ekonomi kontemporer ditandai dengan sifat jaringan.

Sejak tiga dekade yang lalu, perdagangan intra Perusahaan Multinasional (MNC), baik antara sesama jaringan perusahaan maupun sesama industri telah menjadi karakter perdagangan di kawasan Asia. Operasi ini biasanya dilakukan oleh perusahaan elektronik dan permobilan Jepang. Biasanya ASEAN mengimpor dari Jepang barang modal berupa mesin-mesin dan perlengkapan pabrik. Kemudian perakitan dilakukan di kawasan itu sebelum diekspor ke Amerika atau Uni Eropa. Ini menjelaskan mengapa impor dan ekspor ASEAN ke Jepang sama-sama didominasi komoditas mesin dan peralatan elektronik (Bernardino, 2004: 6-7). Toyota motor misalnya, menciptakan jaringan operasional perusahaan di seluruh kawasan ini. Dia memiliki kantor pusat di Singapura, perakitan di Indonesia, Filipina, Malaysia, Vietnam dan Thailand. Sementara keuangan dan pelatihan dipusatkan di Kamboja, Thailand dan Myanmar. Selanjutnya bagian pemasok suku cadang ditempatkan di Malaysia, Filipina dan Thailand.

Kasus ASEAN dengan Cina tidak terlalu berbeda dengan pola diatas. Para ahli ASEAN-Cina mencatat bahwa peralatan mesin dan elektronik yang diekspor Cina ke ASEAN adalah untuk penggunaan umum dan khusus. Sebaliknya, sebagian besar ekspor dari ASEAN atau impor Cina dari ASEAN adalah *spare-parts* atau komponen dari peralatan mesin atau elektronik. Sebagai contoh, ekspor terpenting Singapura ke Cina pada tahun 2000 adalah katup elektronik, bagian dari mesin pemroses data dan komponen lain bagi peralatan kelistrikan industri. Pada tahun yang sama, barang manufaktur yang diekspor Filipina sebagian besar semi-konduktor. Sementara ekspor transistor, sirkuit terintegrasi dan berbagai peralatan listrik merupakan bagian terbesar dari ekspor peralatan mesin dan elektronik yang dikirim Malaysia dan Thailand ke Cina (Wong&Chan, 2003: 516). Dengan pola seperti ini, impor Cina dari ASEAN akan dipadukan dan diolah lagi sebelum akhirnya menjadi produk jadi yang siap diekspor ke Amerika, Jepang dan Uni Eropa.

Kondisi di atas menggambarkan bahwa perdagangan kini tidak lagi hanya dilakukan oleh negara, MNC makin dominan sebagai aktor perdagangan. Namun MNC tidak sendirian dalam menjalankan jaringan produksinya. Jaringan MNC berjaln kelindan dengan titik-titik kepentingan elit ekonomi-politik yang mendukung strategi pembangunan neo-klasik. Elit-elit di negara-negara ASEAN dan Cina sendiri sangat mendukung dan terlibat dalam satu jaringan dengan MNC. Elit-elit itu bersama MNC sebagai suatu jaringan memiliki kepentingan yang sama, kepentingan jaringan: menggenjot akumulasi produksi melalui investasi asing yang difasilitasi negara. Kepentingan ini tidak ditentukan oleh 'pusat' tertentu, bukan oleh MNC secara sepihak ataupun oleh elit-elit negara. Kepentingan jaringan

ini terbentuk melalui perjuangan aktor-aktor sosial sebelumnya, baik MNC maupun para pendukung strategi neo-klasik yang mengalahkan tujuan jaringan lain (komunisme dengan peran dominan negara). Akhirnya yang disebut pertama memenangkan dominasi dan ditetapkan sebagai tujuan bersama. Sekali tujuan ditetapkan, unit-unit dalam jaringan (MNC, elit-elit ekonomi-politik di negara-negara kawasan) akan dengan sendirinya berusaha mencapai tujuan jaringan.

Berhimpitan dengan kepentingan negara-negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi, MNC diberi berbagai kemudahan untuk melakukan ekspor-impor dengan sesama industri atau transaksi dalam jaringan perusahaannya sendiri yang melintasi batas-batas negara. Kemudahan bagi MNC diberikan karena unit negara-negara (Cina/ASEAN) sama-sama menggunakan strategi industri berorientasi ekspor meskipun melakukan diversifikasi produk (Wong&Chan, 2003: 515). Negara-negara memberikan kemudahan agar keuntungan MNC dapat terus ditingkatkan, sementara MNC memberikan bahan bakar bagi negara untuk memacu pertumbuhan ekonomi yang penting bagi legitimasi kekuasaan elit-elit ekonomi-politik yang berparadigma neo-klasik. Kini, kawasan perdagangan bebas dimaknai sebagai upaya menghilangkan hambatan tradisional (aturan di negara berdaulat) agar ekspansi usaha dapat terus ditingkatkan dan pertumbuhan ekonomi dapat digenjut. Seperti yang dinyatakan oleh Bernardino (2004: 6-7):

*“Logika integrasi ekonomi hari ini yang bernaung dalam perjanjian perdagangan bebas bukanlah secara sederhana persoalan meningkatkan hubungan ketergantungan diantara negara berdaulat belaka, seperti yang terjadi pada masa merkantilis. Hadirnya dan meningkatnya dominasi perusahaan Multinasional (MNC) pada satu abad terakhir telah mengubah ekonomi global yang sesuai dengan filosofi pencarian keuntungan mereka. Difasilitasi oleh kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, MNC mampu untuk memindahkan bagian produksi mereka ke kawasan dengan upah rendah di negara-negara berkembang. Jaringan produksi regional maupun global diciptakan dalam tahap yang berbeda di masing-masing proses produksi yang berlokasi di beberapa negara, baik produksi bagian komponen, semi-perakitan bagi produk setengah jadi, atau bagian distribusi dan penjualan. Dalam sebagian besar kasus, produksi dapat sangat dinamis yang memungkinkan MNC memindahkan unit produksi dari satu lokasi ke lokasi lain yang lebih menguntungkan, biasanya karena buruh yang lebih murah. Sistem produksi internasional seperti itu telah memberi dampak signifikan bagi aliran perdagangan, dengan banyaknya aliran perdagangan yang mengambil tempat di dalam jaringan MNC itu sendiri”*

Dengan dominannya logika jaringan dalam pengelolaan MNC yang didukung oleh kepentingan negara-negara untuk menjalankan strategi pembangunan neo-klasik (memacu pertumbuhan ekonomi melalui investasi asing), kesepakatan ACFTA perlu dilihat dalam sudut pandang baru.

Hubungan ASEAN dan Cina tidaklah bersifat komplementer, tapi lebih pada kompetisi (Wong&Chan, 2003). Cina dalam waktu dekat tidak akan bisa menggantikan ASEAN sebagai pasar utama produk mereka. Begitu pula ASEAN yang masih mengeskpor sebagian besar produknya ke Amerika dan Eropa. Cina dan ASEAN adalah sama-sama kawasan eksportir bagi negara-negara maju. Cina dan ASEAN sama-sama berebut aliran FDI untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi (Avila, 2005: 131). Unit yang kalah bersaing atau yang mulai tidak setuju dengan tujuan jaringan akan ditinggalkan atau dieksklusi dari jaringan dengan mencari unit baru yang lebih bermanfaat bagi jaringan. Mereka harus berlomba menciptakan iklim investasi yang baik: stabilitas politik (di Cina dengan cara otoriter), buruh murah dan terkendali, dan infrastruktur yang memadai. Cina dan ASEAN dalam struktur pembagian kerja internasional sama-sama bertugas sebagai penyedia tempat untuk berdirinya pabrik yang dioperasikan oleh buruh-buruh murah (meskipun buruh di Cina lebih murah dari ASEAN), tempat modal diakumulasikan dan keuntungan (repatriasi) perusahaan-perusahaan asing (MNC) yang beroperasi di kawasan itu dikembalikan ke negara-negara pemilik modal. ACFTA tidak lebih dari upaya ekspansi kapital di kawasan Cina-ASEAN yang didukung oleh MNC dan jaringan elit ekonomi-politik yang berparadigma neo-klasik.

Dalam struktur seperti ini, hanya jaringan elit ekonomi-politik di Cina dan ASEAN yang akan diuntungkan. Mereka berkolaborasi dengan perusahaan asing dan menikmati sedikit keuntungan (*privilege*) dari rekan asing mereka itu. Sementara rakyat kebanyakan, petani, buruh, sektor informal bukannya menikmati *trickle-down effect*, tapi justru menyumbang (*trickle-up effect*)<sup>16</sup> terhadap keuntungan dari model pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi asing yang berorientasi ekspor. Kesenjangan kini tidak lagi terjadi antar negara saja, tapi juga antar jaringan orang. Orang-orang yang mampu mengikatkan diri dalam jaringan ini (strategi pertumbuhan dengan investasi asing) akan mampu menikmati sedikit keuntungan. Sebaliknya, mereka yang berada di luar jaringan (karena dibatasi secara sistematis berdasarkan status pendidikan, kesehatan, pendapatan, dst) akan dieksklusi dan disingkirkan. Elit-elit ekonomi-politik yang berkuasa melegitimasi kekuasaan mereka dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Namun siapa yang paling menikmati buah pertumbuhan itu tidak pernah dipersoalkan. Mereka semua menoleransi kesenjangan demi pertumbuhan. Mereka berujar bahwa kesenjangan adalah 'harga yang harus dibayar' demi pertumbuhan. Akibatnya, ketimpangan makin melebar ditengah pertumbuhan yang maha tinggi.

---

16 Ini adalah konsep yang berlawanan dengan *trickle down effect* yang sering dikedepankan para pendukung neo-klasik. Karena faktanya, tetesan yang terjadi bukan ke bawah, tapi justru tetesan ke atas, keuntungan terbesar kembali ke elit-elit yang telah kaya dengan mengambil keuntungan dari orang-orang yang sebelumnya telah miskin.

### **Jaringan Elit-elit Ekonomi-Politik Makin Menguat dan Massa yang Kian Melemah: Dampak Strategi Pembangunan Neo-Klasik dan Dominannya MNC**

Ketimpangan itu dapat dilihat secara jelas di Cina. Di negeri yang tumbuh paling drastis selama tiga dekade terakhir itu, kue ekonomi hanya dinikmati oleh segilintir elit-elitnya. Ketimpangan ini dapat dilihat dari tingginya angka koefisien gini negeri bekas komunis itu. Pada tahun 1980, koefisien gini Cina adalah 0,32 turun menjadi 0,26 pada awal reformasi 1980-1984. Tapi naik lagi pada tahun 1990 menjadi 0,36. Pada tahun 2001, angkanya meningkat drastis menjadi 0,45. Angka ini terus naik menjadi 0,47 di tahun 2007 (The World Factbook, 2008). Cina berubah dari negara paling egalitarian di dunia menjadi salah satu negara paling timpang di muka bumi bersama negara-negara di kawasan Amerika Selatan dan Afrika (Wang, 2008:18). Cina menurut laporan Bank Dunia pada tahun 2004 menempati peringkat 85 dari 120 negara yang memiliki kesenjangan tinggi. Koefisien gini itu tergambar jelas dari kesenjangan pendapatan di Cina.

*“While the average annual urban income is just \$1,200, some five to seven percent of the Chinese population – predominantly the owners of small businesses, well-to-do farmers, professionals and state functionaries – earn between \$3,000 to \$12,000 a year. One percent – some 12 million people – earn over \$20,000. An even smaller number of capitalist entrepreneurs, those with close ties to the global corporate giants and also to Beijing, have amassed staggering levels of wealth. There are now some 10,000 individuals in Cina whose assets exceed \$10 million” (Chan, 2003).*

Ketimpangan juga terjadi antar wilayah. Secara konvensional daerah di Cina dibedakan menjadi dua kelompok, yaitu pesisir, sebanyak 11 provinsi: Beijing, Tianjin, Shanghai, Hebei, Liaoning, Jiangsu, Zhejiang, Fujian, Shandong, Guangdong, dan Hainan. Sementara daerah sisanya sebanyak 19 provinsi merupakan kawasan pedalaman (Liang 2008: 116). Pada tahun 2001, dari 30 provinsi di Cina, tiga kota metropolitan (Shanghai, Beijing, dan Tianjin) memperoleh GDP tertinggi dengan nilai sekarang 37,382 yuan; 25,300 yuan; dan 19,986 yuan. Sementara empat provinsi pesisir, yaitu Zhejiang, Guangdong, Jiangsu, dan Fujian memiliki GDP sebesar 14,550 yuan; 13,612 yuan dan 12,375 yuan. Sebaliknya, provinsi-provinsi di wilayah Barat seperti Guizhou, Gansu, Guangxi, dan Yunan hanya memperoleh GDP sebesar 2,865 yuan; 4,173 yuan; 4,679 yuan dan 4,872 yuan. Ini berarti GDP di Shanghai dan Zhejiang sekitar 13 kali GDP di wilayah Guizhou (Lin and Liu, 2008: 56). Kesenjangan antar wilayah ini semakin meningkat sejak 1990-an. Daerah pesisir menerima 85% investasi asing yang masuk ke Cina (Antentas and Vivas, 2008).

Kesenjangan pendapatan ini ternyata juga menyebabkan ketimpangan pada kemampuan inovasi antar wilayah (Fan and Wan, 2008: 161). Kesenjangan antara wilayah pesisir dan pedalaman juga merembet pada kesenjangan kesempatan untuk mendapatkan pendidikan. Orang-orang di wilayah pesisir memiliki kesempatan lebih besar untuk memperoleh pendidikan di atas sembilan tahun dibanding wilayah pedalaman (Lee, 2008: 172). Bahkan di dalam satu kawasan pun, kesenjangan juga tetap dapat ditemui. Kesenjangan ini terjadi antara desa-kota dalam provinsi-provinsi di Cina (Yao, 2005). Rata-rata pendapatan di kota mencapai tiga kali lipat dari pendapatan di desa (Sicular et.all, 2008: 30). Cina menjadi salah satu negara dengan rasio pendapatan desa-kota yang tertinggi.

**Tabel 6. Rata-rata Pendapatan Rumah Tangga Nasional, Kota, Desa dan Kesenjangan Kota-Desa**

	1995			2002			
	N B S , tidak disesuaikan	Tidak disesuaikan	PPP	N B S , tidak disesuaikan	Tidak disesuaikan	PPP	PPP, Harga 1995
Nasional	2,3	2,921	2,584	4,770	5,826	5,139	4,554
Kota	4,4	5,635	4,259	8,038	10,004	7,798	6,910
Desa	1,5	1,810	1,899	2,673	3,145	3,434	3,043
<b>Ratio Desa-Kota</b>	<b>2.8</b>	<b>3.11</b>	<b>2.24</b>	<b>3.01</b>	<b>3.18</b>	<b>2.27</b>	<b>2.27</b>
	<b>3</b>						
Kota minus Desa	2,865	3,825	2,360	5,366	6,858	4,364	3,867

**Sumber:** Sicular et.all, (2008: 37)

Ket: NBS adalah *National Bureau Statistics Cina*

Seperti yang terlihat dalam tabel 1, rasio 3:1 antara kota-desa atau mendekati angka itu merupakan kesenjangan yang tinggi menurut standar internasional. Mengutip Eastwood dan Lipton (2004), Sicular dkk. (2008: 38) menyatakan bahwa rasio pendapatan kota-desa di negara-negara Asia lainnya pada tahun 1990-an rata-rata hanya berada pada level 1,3 hingga 1,8 dengan Filipina menempati kesenjangan tertinggi dengan rasio 2, 17.

Kue ekonomi ternyata lebih banyak disantap oleh segilintir elit-elit politik dan ekonomi Cina. Orang-orang yang beruntung menikmati sebagian besar kue ekonomi itu adalah elit-elit politik di Partai Komunis Cina (Chinese Communist Party) dan elit-elit pejabat pemerintahan pada semua level, dari pusat hingga ke pedesaan. Mereka menjalin klik dalam hubungan patron-klien dengan segilintir pengusaha (Yu, 2009).

Untuk merapatkan barisan, elite-elite PKC bahkan membongkar aturan dasar mereka sendiri tentang dilarangnya pengusaha untuk masuk dalam

PKC dan mengabdikan pada pemerintahan. Aturan ini diubah pada Kongres nasional ke-16 PKC pada November 2002 (Chan, 2002). Sekretaris jenderal PKC, Jiang Zemin menyebut teori 'Tiga Perwakilan' dalam PKC harus diwujudkan demi merespon perkembangan kaum kapitalis Cina yang terus bertambah. Kaum kapitalis harus dimasukkan sebagai 'perwakilan ketiga' disamping pemerintah dan anggota PKC sendiri. Ketika Jiang menyatakan perlunya PKC melindungi hak kepemilikan pribadi dan bisnis, seluruh peserta Kongres bertepuk tangan meriah. Terbentuknya 'Tiga Perwakilan' ini telah makin menguatkan jaringan elite-elite politik-ekonomi Cina dalam satu kekuatan. Korupsi pun menjadi barang yang jamak ditemui di Cina (Yao, 2005: xvii).

Jika elit-elit ekonomi-politik menikmati buah pertumbuhan, sebaliknya, kelompok buruh, petani, maupun pekerja informal baik di kota maupun di desa tinggal memperoleh sisa-sisa kue ekonomi yang dibentuk oleh kerja keras mereka. Buruh seperti telah disinggung di depan menjadi 'keunggulan komparatif' Cina dalam menarik investasi asing. Sementara petani Cina juga semakin mengalami tekanan hebat sejak diterapkannya berbagai macam pajak dan retribusi oleh negara. Petani memang masih punya sejenkal tanah, tapi beban mereka bertambah berat sejak diterapkannya berbagai pajak pada tahun 1990-an hingga 2006 (Yao, 2005). Kepemilikan tanah mereka pun bukannya tanpa ancaman. Setelah privatisasi tanah perkotaan, muncul desakan yang sangat kuat dari para elit-elit birokrat baik di kota maupun di pedesaan untuk melakukan privatisasi tanah pedesaan.

Kesengsaraan yang dirasakan masyarakat pedesaan telah mendorong mereka melakukan migrasi ke kota-kota. Sejak tahun 1980-an, diperkirakan 150 juta penduduk desa bermigrasi ke kawasan perkotaan. Mereka mencari pekerjaan dengan upah seadanya. Migrasi di Cina bahkan disebut-sebut sebagai migrasi terbesar dalam sejarah umat manusia (Chan, 2003). Seperti terlihat dalam tabel 2, pada saat reformasi ekonomi dimulai tahun 1978, penduduk yang tinggal di desa-kota masih sebesar 83,3 : 16,7. Pada tahun 2002, proporsi penduduk yang tinggal di kota meningkat drastis menjadi 39,1 % sementara yang tinggal di desa sebesar 60,9%.

**Tabel 7. Perubahan Struktur Populasi Cina, 1978-2002**

Tahun	Total Populasi (juta)	Struktur Desa-Kota (%)		Zona Ekonomi (%)		
		Desa	Kota	Barat	Tengah	Timur
1978	962.6	83.3	16.7	23.2	35.7	41.0
1995	1211.2	71.0	29.0	22.9	35.9	41.2
2002	1284.5	60.9	39.1	23.0	35.7	41.3

Sumber: Yao (2005: 129)

Migrasi ternyata bukannya tanpa masalah jika tidak ingin dikatakan justru menambah masalah baru.<sup>17</sup> Orang-orang pedesaan yang tidak memiliki keterampilan ternyata banyak yang tidak tertampung dalam lapangan kerja di kota. Terlalu banyak orang yang ingin hidup di kota, membuat kemampuan kota menyediakan pekerjaan dan tempat berkurang. Sebagian dari mereka bekerja di sector informal. Pekerja informal yang berasal dari pedesaan ini pun akhirnya dieksploitasi di perkotaan: *"In each of Cina's largest and richest cities of Beijing, Shanghai and Guangzhou, there are over 3 million peasant workers doing all kinds of hard work. They work seven days a week and over 12 hours per day but get a minimum salary which is hardly enough for their own living without also supporting their families back home"* (Yao, 2005: 70). Banyak juga yang frustrasi akhirnya ikut jaringan kriminalitas dan gadis-gadis belia banyak yang masuk dalam jaringan prostitusi (Yao, 2005: xvii). Sementara daerah yang ditinggalkan kekurangan tenaga kerja dan akhirnya makin terbelakang.

Pemerintah Cina menerapkan peraturan 'hukou' untuk meredam migrasi yang makin tidak terkontrol (Sicular et.al, 2008: 30). Disini, tiap orang memiliki identitas yang terdaftar (*hukou*) pada satu tempat saja, desa atau kota. Mereka tidak dapat mengubah *hukou* tanpa memperoleh ijin dari kawasan yang menerima imigran. Biasanya kota hanya memberikan ijin kepada mereka yang memiliki keterampilan sementara kota secara umum akan menolak mengeluarkan *hukou* bagi penduduk dari daerah pedalaman (desa). Namun faktanya, pembangunan ekonomi yang massif di Cina memerlukan tenaga-tenaga migran ini. Mereka ini akhirnya tetap saja melakukan migrasi meskipun secara illegal. Akibatnya, mereka masuk dalam apa yang disebut *"floating population"* (Dollar, 2007: 10). Mereka ini biasanya paling tidak bekerja selama enam bulan di kota untuk kemudian kembali daerah asalnya.

Berbagai bentuk kesenjangan yang tinggi telah mempersulit upaya memberantas kemiskinan di Cina (Yao, 2005). Kemiskinan memang berkurang, tapi masih banyak orang yang terperangkap dalam kemiskinan. Cina masih menjadi wilayah terbesar kedua di dunia yang menyumbang kemiskinan. Merujuk pada laporan Bank Dunia, Zhang and Wan (2008: 33) menyatakan bahwa pada tahun 2001, 210 juta orang Cina berada di bawah garis kemiskinan dengan pendapatan kurang dari 1,08 dollar/hari. Pengurangan kemiskinan di Cina mulai melambat pada pertengahan 1990-an meskipun pertumbuhan ekonomi tetap berada pada rata-rata 8 persen/tahun.

Pemerintahan Cina bukannya tidak menyadari dampak buruk terhadap masyarakatnya, namun *"Tiga Perwakilan"*: pemerintah, PKC, dan kapitalis, dengan strategi pembangunan modernisasi ala neo-klasiknya, seperti sudah

---

17 Ini berlawanan dengan pendapat resmi Bank Dunia maupun para ekonom yang bergabung di dalamnya. Mereka umumnya berpendapat bahwa migrasi merupakan cara terbaik untuk mengatasi ketimpangan yang terjadi di Cina. Selengkapnya lihat misalnya: (David Dollar, 2007, *Poverty, inequality and social disparities during Cina's Economic Reform*, World Bank Policy Research Working Paper No. 4253; (Mei Zhang, 2003, *Cina's Poor Regions*, New York: RoutledgeCurzon).

tidak punya pilihan lain. Dengan mengutamakan pertumbuhan ekonomi dengan menggenjot ekspor yang ditopang oleh investasi asing, ketimpangan baik antar kelas, kawasan dan regional tidak terhindarkan melanda Cina. Di tengah ketertutupan politik, pembangunan ekonomi menjadi satu-satunya legitimasi bagi rezim penguasa (Weatherly, 2006: 14). Tidak mengherankan jika Perdana Menteri Cina, Zhu Rongji pada awal 2000-an menyatakan kekhawatiran legitimasi rezim yang menopangnya:

*“The economic situation and social contradictions are increasingly sharp and explosive; the party has not controlled corruption; the laid-off and unemployed millions are denouncing the government and the Communist Party; the peasants are facing heavy burdens and want to rebel. The political crisis can erupt at any time if these three major problems cannot be solved properly and on time. Otherwise, it will not be only a few cities, but thousands and millions marching on the streets demanding the downfall of the Communist Party.” (Chan, 2002).*

Sama halnya dengan kondisi di Cina, di kawasan ASEAN, pertumbuhan juga diikuti dengan ketimpangan yang kian melebar. Ketimpangan ini dapat dilihat dari indeks gini yang rata-rata berada di level 0,4. Bahkan sebelum krisis keuangan 1997/1998, koefisien gini telah relatif tinggi. Pada tahun 1997, indeks gini di Filipina telah mencapai 0,51, Malaysia 0,46 serta pada tahun 1998 indeks gini Thailand mencapai 0,51, (Balisacan&Ducasan, 2005: 15-16). Di Vietnam indeks gini masih berada di angka 0,35 di tahun 1998 sebelum naik menjadi 0,41 pada tahun 2002 (Asia Times, 10/4/2002). Pada tahun 2004, ketimpangan tertinggi terjadi di Malaysia dengan indeks gini mencapai 0,49; disusul Philippina dengan 0,46; Singapura; Thailand 0,43; Vietnam 0,36 dan Indonesia 0,34 (UNDP, 2004). Jika dilihat dari konsumsi per 10% penduduk termiskin hingga 10% penduduk terkaya, lebih dari sepertiga konsumsi di Malaysia, Singapura, Thailand, dan Filipina dinikmati oleh 10% penduduk terkaya mereka (Hossain, Kathuria&Islam, 2010: 35). Sementara 30% penduduk termiskin hanya menikmati kurang dari seperempat total konsumsi. Ketimpangan tidak banyak berubah beberapa tahun berikutnya. Pada tahun 2006, indeks gini Thailand berada di level 0,43 sementara di tahun 2008, Singapura 0,48; (The World Factbook, 2010) dan Filipina 0,44 di tahun 2009 (World Development Indicators, 2009). Di Indonesia, rasio gini sebagai parameter ketimpangan ekonomi juga makin membesar dari 0,288 pada 2002 menjadi 0,345 pada 2006 (Investor Daily, 23/11/2007).<sup>18</sup>

18 Pertumbuhan ekonomi Indonesia sejak 2000 hanya dinikmati oleh 40% golongan menengah dan 20% golongan terkaya. Sisanya, sebanyak 40% kelompok penduduk berpendapatan terendah makin tersisih. Kelompok penduduk ini hanya menikmati porsi pertumbuhan ekonomi 19,2% pada 2006, makin kecil dibanding tahun 2000 sebesar 20,92%. Sebaliknya, 20% kelompok penduduk terkaya makin menikmati pertumbuhan ekonomi, dari 42,19% menjadi 45,72% (Kuncoro, 2007). Pertumbuhan kelompok super kaya (*high net-worth individual*/HNWI) Indonesia juga sangat pesat, berada di peringkat ketiga di Asia Pasifik setelah Singapura dan India. Menurut laporan Merrill Lynch, pertumbuhan HNWI di Indonesia mencapai 16%, sedangkan di kawasan Asia Pasifik hanya sekitar 8,6%, sementara rata-rata dunia hanya 8,3%.

Kelompok yang meneguk keuntungan dari pertumbuhan ekonomi tinggi adalah elit-elit politik dan ekonomi yang saling jalin-kelindan dalam sebuah jaringan. Pengusaha di kawasan berkolaborasi dengan elit politik dan rekan asing mereka yang menyediakan FDI adalah kelompok yang diuntungkan dari strategi pertumbuhan. Umumnya mereka bukan pengusaha independen yang karena keahliannya memperoleh kesuksesan, tapi lebih banyak tergantung pada konsesi dari negara (Yoshihara, 1988). Maka kaum pengusaha bersama elit politik negara masing-masing berkolaborasi mendukung *status-quo*. Para konglomerat ini (Case, 2003: 252) bersama para keluarga dan pendukungnya berjalin kelindan menikmati pertumbuhan. Akses ekonomi, politik, pendidikan kesehatan terbuka lebar bagi pengikut kelompok ini<sup>19</sup>.

Sebaliknya, kelompok buruh, baik yang bekerja di industri maupun pertanian, petani kecil dan pekerja informal hanya memperoleh sisa kue pembangunan. Seperti yang telah ditunjukkan pada grafik 1, buruh industri di ASEAN merupakan 'keunggulan komparatif' untuk menarik investor asing. Buruh murah menjadi fakta yang sulit dibantah. Buruh murah membutuhkan pangan murah. Problem ini merembet pada tekanan kesejahteraan petani.

Golongan petani yang paling terjepit adalah petani gurem dan buruh tani. Meskipun sumbangan sektor pertanian terhadap GDP menunjukkan penurunan di negara-negara ASEAN<sup>20</sup>, namun jumlah rumah tangga tani menunjukkan gejala sebaliknya. Indonesia, negara terbesar di ASEAN, jumlah rumah tangga petani di tahun 2003 berjumlah 25,4 juta atau sekitar 47,01% dari total rumah tangga, meningkat dari tahun 1993 yang masih berjumlah 20,8 juta (BPS, 2004).<sup>21</sup> Sayangnya, jumlah rumah tangga tani didominasi

---

19 Case menyebut elit-elit di Asia Tenggara saling membantu sama lain dalam berbagai cara: "National leaders often take council from casually posted *eminence grise*, whether close personal advisors, spouses, golfing buddies, or drinking companions. At the same time, these leaders elevate their children routinely in business, breeding cohorts of 'princelings', while businessman thrust up their children in politics. And finance ministers and high-level bureaucrats privatize state assets to their relatives and cronies, while politicians recruit co-ethnics and co-religionists into their party and bureaucrats hierarchies" (Case, 2003: 249-250).

20 Di Indonesia, pada tahun 1968, sumbangan sektor pertanian terhadap PDB masih berjumlah 51%, dua puluh tahun kemudian, angka ini turun menjadi 24,1%. Sumbangan sektor pertanian kembali turun berturut-turut menjadi 15,6% di tahun 2000 dan tinggal menyisakan 13,9% pada tahun 2006. Sebaliknya sektor industri terus meningkatkan sumbangannya pada PDB. Mulai melonjak pada tahun 1988 menjadi 18,5% dibanding pada tahun 1968 yang hanya 8,5%. Angka ini terus naik pada tahun 2000 menjadi 45,9% dan 47,0% pada tahun 2006 (ADB, 2006).

21 Dari jumlah itu, lebih dari separuhnya (13,7 juta rumah tangga petani) hanya menguasai tanah kurang dari 0,5 hektar. Di tahun 2003, 11,27% rumah tangga menguasai 46,41% total tanah dengan rata-rata penguasaan tanah 3,26 hektar, naik dari tahun 1993 yang masih 2,8 hektar. Sementara 74,82% rumah tangga lainnya hanya menguasai 28,24% dengan rata-rata penguasaan tanah 0,35 hektar (Sensus Pertanian BPS, 2003). Indeks gini penguasaan lahan meningkat secara konsisten dari 0,5481 di tahun 1973 menjadi 0,7171 pada tahun 2003 (Sensus Pertanian BPS, 1973 dan 2003). Kesenjangan kepemilikan tanah menunjukkan kenaikan yang makin memprihatinkan.

oleh petani gurem (menguasai kurang dari 0,5 ha) dan petani nir lahan yang akhirnya menjadi buruh tani. Petani gurem meningkat jumlahnya dari 10,8 juta rumah tangga (52,7%) pada 1993 menjadi 13,7 juta (56,5%) di tahun 2003 (BPS, 2004). Di Jawa, tiga dari empat petani termasuk petani gurem. Jumlah buruh tani meningkat dari 9 juta kepala keluarga pada tahun 1993 (BPS, 1993:8,70) menjadi sekitar 13 juta pada tahun 2003. Buruh tani berjumlah sekitar 30% dari jumlah seluruh petani. Petani yang tidak punya lahan ini terpaksa menjual tenaga mereka dengan murah kepada petani pemilik lahan.

Tidak mengejutkan jika kemiskinan di daerah pedesaan lebih tinggi dibanding di perkotaan. Tabel menunjukkan bahwa rata-rata 70% kemiskinan di ASEAN ada di daerah pedesaan. Kamboja menempati peringkat tertinggi dengan 93,8%. Diikuti Vietnam dan Thailand masing-masing 92,3% dan 91,3%. Indonesia pada tahun 2002 70% penduduk miskinnya masih berada di pedesaan.<sup>22</sup>

**Tabel 8. Kemiskinan di Asia Tenggara**

Tingkat Kemiskinan (%) menggunakan garis kemiskinan nasional					
Negara		Total	Kota	Desa	Kontribusi Kemiskinan Desa terhadap Total Jumlah Kemiskinan (%)
Kamboja	(1999)	35.9	18.2	40.1	93.8
Indonesia	(2002)	18.2	14.5	21.1	70.3
Laos	(1997)	38.6	26.9	41.0	80.7
Malaysia	(1999)	7.5	3.4	12.4	69.3
Filipina	(2000)	34.0	20.4	47.4	72.4
Thailand	(2002)	9.8	4.0	12.6	91.3
Vietnam	(2002)	28.9	6.6	35.6	92.3

**Sumber:** Balisacan, Edillon & Piza (2005: 27)

Problem kemiskinan pedesaan merembet menjadi persoalan baru ketika urbanisasi massif terjadi tanpaantisipasi memadai. Pada tahun 2010, jumlah penduduk Asia Tenggara yang tinggal di kawasan kota telah mencapai 44,8% dari total populasi. Diperkirakan persentase ini akan meningkat menjadi 48,1% pada 2015 dan 56,5% di tahun 2030. Meski angka ini telah cukup tinggi, sejumlah pengamat masih mempertanyakan data dari PBB itu. Mereka umumnya berpendapat bahwa tingkat urbanisasi jauh lebih tinggi dari data yang disajikan (Sheng, 2004: 38; Jones, 1997: 238-239). Dari sini dapat dikatakan bahwa tingkat urbanisasi makin massif di kawasan Asia Tenggara. Fenomena makin banyaknya 'megacity' (kota dengan penduduk lebih dari delapan juta) di kawasan ini seperti Jakarta, Bangkok dan Manila juga memberikan

<sup>22</sup> Pada tahun 2010, penduduk miskin di daerah pedesaan menjadi 64,23 persen (BPS, 2010).

gambaran jelas terhadap tingginya urbanisasi (Jones, 1997: 241). Meluasnya kawasan kumuh di kota-kota besar Asia Tenggara menggambarkan masalah serius urbanisasi.

Tabel 9. Urbanisasi di Asia Tenggara

Tahun	Populasi Perkotaan (ribu)	Populasi Desa (ribu)	Persentase Populasi Kota terhadap total penduduk	Rata-rata Pertumbuhan Lima Tahunan Populasi Kota
1975	87,087	249,749	22.3	4.10
2000	196,029	326,092	37.5	3.67
2010	-	-	44.8	2.8
2015	302,006	326,207	48.1	2.52
2030	407,174	313,269	56.5	1.78

**Sumber:** United Nations Population Division Cq. Sheng (2004: 39) & Jones (1997: 238)

Tentu saja tidak semua migran dari desa mendapatkan pekerjaan formal yang mereka inginkan. Ketidakmampuan kota menampung pencari kerja memaksa mereka bekerja di sektor informal<sup>23</sup> baik di perkotaan maupun pedesaan. Pada tahun 1998, pekerja informal Indonesia mencapai 77,9% dari total pekerja. Mendekati Indonesia, Thailand pada tahun 1994 memiliki pekerja informal sebesar 76,8%. Filipina tercatat memiliki 66,9% pekerja informal di tahun 1995 (Amin, 2002: 15). Di perkotaan, persentase pekerja informal terhadap seluruh pekerja di kota juga tidak menunjukkan perbedaan signifikan. Jakarta pada tahun 1980-an memiliki 65%, Manila di periode yang sama terdapat 50% pekerja informal. Sementara di Bangkok sekitar 59,5% pekerja informal pada tahun 1999 (Amin, 2002: 13). Kecenderungan serupa juga terjadi di Ho Chi Minh City dan Hanoi. Sayangnya, banyak pekerjaan di sektor informal ini sering tidak bisa dilepaskan dari kesan kemiskinan dan kekumuhan. Survey yang dilaksanakan di Bangkok menunjukkan, 87% penghuni kawasan kumuh bekerja di sektor informal. Pelayanan dasar seperti listrik dan akses air bersih dan layanan sosial seperti sekolah dan rumah sakit sangat sulit untuk diakses warga. Pendapatan rendah diantara pekerja informal membatasi kesempatan mereka untuk hidup dan bekerja di lingkungan yang bersih dan aman (Amin, 2002: 55-56). Kondisi ini menunjukkan betapa minimnya perlindungan sosial dan jaminan keselamatan kerja terhadap para pekerja informal. Dalam laporan yang luas dan mendalam tentang sektor informal di Asia, termasuk di Asia Tenggara (Indonesia, Filipina dan Thailand), Amin (2002: 60, 63) menyimpulkan:

<sup>23</sup> Sektor informal yang dimaksud adalah: "...an entity that has official non-status, lacks solid legal status, and is unprotected or unregulated by state institutions". Selengkapnya lihat Amin (2002: 8).

*"Few state or employer-sponsored social protection measures exist for the informal sector. This vacuum, to an extent, is still taken care of by the traditional support system in the case of the rural agricultural labour force, whereas in the case of the urban informal sector labour force, social movement organizations and NGOs are attempting to fill the vacuum on a limited scale... Although some informal sector jobs are quite hazardous (e.g., recovery of recyclables from dumpsites) and the associated health risks are high, policy interventions and public actions for occupational safety and for reducing health risks of informal sector workers are still very few".*

Selain di sektor informal yang 'legal', banyak migran yang tidak beruntung dimanfaatkan oleh jaringan mafia perdagangan manusia yang terbentang di kawasan Asia Tenggara. International Organization for Migration (IOM) mencatat paling tidak 200 - 225 ribu wanita dan anak-anak di kawasan ASEAN menjadi korban perdagangan manusia tiap tahun. Sekitar 30 ribu diantaranya dijual ke Amerika Serikat. IOM juga melansir bahwa perdagangan manusia intra ASEAN menduduki porsi 60% dari total perdagangan manusia di dunia (Derks, 2000: 16). Asia Tenggara menjadi kawasan perdagangan manusia yang sangat signifikan (Larsen, 2010: 1). Pertumbuhan ekonomi tinggi di beberapa negara diikuti oleh sejumlah faktor pendorong lain telah memicu banyak orang untuk melakukan migrasi di Asia Tenggara. Brunei, Malaysia, Singapura, dan Thailand menjadi tujuan para migran yang berasal dari Kamboja, Indonesia, Laos, Filipina, dan Vietnam. Thailand menempati posisi kunci sebagai tempat tujuan utama di kawasan Sungai Mekong (Larsen, 2010: 2). Negara ini banyak menerima wanita dan anak-anak dari Laos, Kamboja, Myanmar, Provinsi Yunan di Cina, untuk dimasukkan dalam industri prostitusi kawasan. Selain berperan sebagai penerima, Malaysia dan Thailand sekaligus pengirim pekerja migran. Para wanita yang telah dikumpulkan di Thailand maupun Malaysia selanjutnya dikirim ke negara pemesan yang menjangkau Singapura, Jepang, Taiwan, Eropa, Amerika Utara, Afrika Selatan hingga Australia (Derks, 2000: 17).

### **Bagaimana Perubahan Dilakukan?**

Persoalan di atas menunjukkan betapa sekarang jaringan antar orang telah memainkan peran dominan dengan mengaburkan batas-batas negara. Kesenjangan terjadi antar jaringan, bukan antar negara saja. Lalu bagaimana perubahan dapat dilakukan? Bagi perspektif 'jaringan', perubahan sosial dimungkinkan melalui dua cara. Castells (2000: 22) menyebut cara pertama dengan strategi masyarakat komunal. *"The first is the denial of the networking logic through the affirmation of values that cannot be processed in any network, only obeyed and followed"*. Yang dimaksud Castells dengan penguatan nilai yang tidak dapat diproses dalam jaringan dan hanya perlu dipatuhi dan diikuti adalah budaya komunal yang berbasis pada nilai kelompok. Nilai kelompok

ini tidak dapat dioperasikan melalui jaringan karena nilai kelompok ini tidak sama atau bahkan bertentangan dengan nilai kelompok komunal yang lain. Tapi tentu saja, ini tidak perlu dikaitkan dengan fundamentalisme, tetapi lebih pada kelompok yang selalu menempatkan dirinya sendiri sebagai sebagai pusat pemaknaan terhadap mereka sendiri. Castells memberi contoh hal ini dengan menyebut berbagai gerakan yang berbasis keagamaan, nasionalisme, kedaerahan, maupun komunitas etnis. Bagi Castells, pendekatan semacam ini untuk melawan jaringan *mainstream* akan sangat riskan dan justru dapat menimbulkan masalah baru: fragementalisme komunal. Kelompok-kelompok yang berbasis nilai kelompoknya akan makin mudah terpecah dan berkonflik dengan kelompok lain. Kondisi ini tentu akan berbahaya di tengah kemajemukan nilai-nilai yang menonjol di masyarakat kontemporer.

Oleh karena itu, Castells (2000: 23) mengajukan strategi kedua, yaitu dengan membentuk 'jaringan alternatif'. Disini jaringan alternatif dimaknai sebagai "...that is networks built around alternative projects, which compete, from network to network, to build bridges of communication to other networks in society, in opposition to the codes of the currently dominant networks". Di sini Castells ingin menegaskan bahwa perubahan atau tantangan terhadap jaringan dominan hanya mungkin dilakukan melalui tantangan dari luar dirinya, dalam hal ini adalah jaringan lain. Jaringan alternatif akan memiliki tujuan yang berbeda dengan tujuan jaringan dominan. Tapi dengan sama-sama menggunakan logika jaringan, jaringan alternatif akan melakukan perlawanan dalam segala lapisan jaringan dominan. Perlawanan tidak lagi berbasis pada batas-batas kedaerahan, etnis, ras, atau agama, tapi didasarkan pada tujuan sama yang melintasi batas-batas itu. Castells memberi contoh gerakan penyelamat lingkungan, feminisme, dan pejuang hak asasi manusia sebagai jaringan alternatif.

Dalam konteks ACFTA di atas, perlawanan terhadap jaringan utama yang melibatkan pemegang kapital dengan elit-elit politik yang berparadigma neo-klasik perlu dilakukan dengan membangun jaringan alternatif. Disini tidak relevan lagi membicarakan batas-batas negara sebagai unit perlawanan. Jaringan yang melibatkan titik-titik berbagai negara hanya dapat ditantang melalui logika jaringan yang sama tapi dengan tujuan berbeda. Kelompok-kelompok yang dirugikan dari pertumbuhan tinggi ala neo-klasik, buruh, pekerja informal, petani, tidak bisa lagi berjuang menuntut hak-haknya dalam benteng domestik. Perjuangan buruh misalnya yang dilakukan secara sporadis, hanya di negara tertentu, akan mudah dipatahkan karena pemilik kapital dapat memindahkan produksinya ke unit jaringan (negara) yang lain (Winters, 1996). Maka yang diperlukan adalah konsolidasi titik-titik perlawanan di kawasan ACFTA untuk menuntut pergeseran paradigma pembangunan yang lebih memberikan rasa keadilan. Jaringan alternatif yang memberi perhatian utama pada keadilan distribusi hasil pembangunan perlu

segera dibentuk. Namun langkah ini hanya mungkin terlaksana jika muncul kesadaran bersama dari berbagai aktor yang dirugikan, akan pentingnya jaringan alternatif dalam melawan jaringan dominan yang tampak tidak kasat mata namun mencekik itu.

### Penutup

Bagi elit-elit Cina dan ASEAN, ACFTA adalah mekanisme *win-win solution* terhadap ekspansi investasi dan perdagangan. Melalui ACFTA, investasi asing dari Cina diharapkan dapat dialirkan ke ASEAN. Investasi asing dibutuhkan untuk menggenjot pertumbuhan ekonomi yang berbasis ekspor. Selanjutnya, ACFTA juga diharapkan meningkatkan volume perdagangan (ekspor-impor) kedua kawasan. Kedua tujuan ini sangat penting bagi elit-elit politik di kedua kawasan yang menganut strategi neo-klasik. Hanya melalui peningkatan investasi asing dan naiknya volume ekspor, pertumbuhan ekonomi dapat terus dipacu. Dengan pertumbuhan ekonomi tinggi, legitimasi kekuasaannya dapat dipertahankan. Elit-elit itu selalu menjanjikan adanya *trickle down effect* dari ACFTA yang akan menguntungkan masyarakat luas. Namun nampaknya ini hanya ilusi klasik dari ajaran neo-klasik. Faktanya, hubungan Cina-ASEAN tidaklah bersifat komplementer, tapi lebih pada kompetisi Cina dalam waktu dekat tidak akan bisa menggantikan ASEAN sebagai pasar utama produk mereka. Begitu pula ASEAN yang masih mengespor sebagian besar produknya ke Amerika, Jepang, dan Eropa. Cina dan ASEAN adalah sama-sama kawasan eksportir bagi negara-negara maju. Daripada sebagai pengeksportir FDI, Cina dan ASEAN masih sama-sama berebut aliran FDI untuk menopang pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Mereka harus berlomba menciptakan iklim investasi yang baik: stabilitas politik (di Cina dengan cara otoriter), buruh murah dan terkendali, dan infrastruktur yang memadai. Cina dan ASEAN dalam struktur pembagian kerja internasional sama-sama bertugas sebagai penyedia tempat untuk berdirinya pabrik yang dioperasikan oleh buruh-buruh murah (meskipun buruh di Cina lebih murah dari ASEAN), tempat modal diakumulasikan dan keuntungan (repatriasi) perusahaan-perusahaan asing (MNC) yang beroperasi di kawasan itu dikembalikan ke negara-negara pemilik modal. ACFTA tidak lebih dari upaya ekspansi kapital di kawasan Cina-ASEAN yang didukung oleh MNC dan jaringan elit ekonomi-politik yang berparadigma neo-klasik.

Dalam struktur seperti ini, hanya jaringan elit ekonomi-politik di Cina dan ASEAN yang akan diuntungkan. Mereka berkolaborasi dengan perusahaan asing dan menikmati sedikit keuntungan (*privilege*) dari rekan asing mereka itu. Sementara rakyat kebanyakan bukannya menikmati *trickle-down effect*, tapi justru menyumbang *trickle-up effect* terhadap keuntungan dari model pertumbuhan ekonomi yang ditopang oleh investasi asing yang berorientasi ekspor. Buruh murah dijadikan 'keunggulan komparatif' untuk

menarik investasi, petani dibiarkan bersaing dengan petani negara maju yang dilindungi pemerintahannya, sektor informal tetap tanpa jaminan kerja yang memadai. Kesenjangan kini tidak lagi terjadi antar negara saja, tapi juga antar jaringan orang. Orang-orang yang mampu mengikatkan diri dalam jaringan ini (strategi pertumbuhan dengan investasi asing) akan mampu menikmati sedikit keuntungan. Sebaliknya, mereka yang berada di luar jaringan (karena dibatasi secara sistematis berdasarkan status pendidikan, kesehatan, keahlian, dan seterusnya) akan dieksklusi dan disingkirkan.

Kiranya tidak memadai lagi jika dalam kondisi seperti ini, basis perlawanan diarahkan pada unit negara. Aktor-aktor yang terjalin dalam jaringan strategi neo-klasik yang bertumpu pada investasi asing tidak hanya terdapat dalam negara tertentu, tapi lintas batas dalam kawasan. Yang dirugikan tidak hanya buruh di Indonesia atau Myanmar, tapi juga di Cina dan berbagai negara lainnya. Maka yang diperlukan adalah membentuk jaringan alternatif. Kelompok-kelompok petani, buruh, pekerja informal di kawasan yang terpinggirkan dari jaringan dominan, perlu segera melakukan konsolidasi. Hanya dengan membentuk dan memperkuat jaringan alternatif, efek eksploitatif jaringan dominan dapat diminimalisir. ●

## Referensi

- Alexander, R. J. 1967. "The Import-Substitution Strategy of Economic Development". *Journal of Economic Issues*. 1 (4): 297-308.
- Amin, A.T.M.N. 2002. "The Informal Sector in Asia from the Decent Work Perspective". *Working Paper on the Informal Economy* No. 4. Geneva: International Labour Office (ILO).
- Antentas, J.M & Vivas, E. 2008. "The new Chinese Capitalism", *Publico Newspapers*, September, 7.
- Arnold, D. 2006. "Free Trade Agreements and Southeast Asia". *Journal of Contemporary Asia*. 36 (2): 195-216.
- Austin, I. 2001. *Pragmatism and Public Policy in East Asia: Origins, Adaptations and Developments*. Singapore: Fairmont International Private Limited.
- Avila, J.L. 2005. An East Asian FTA: A Philippine Perspective. In Ahn, C.Y, Baldwin, R E. and Cheong, I (Ed.). *East Asian Economic Regionalism Feasibilities and Challenges*. Dordrecht: Springer.
- Bader, J. 2002. Cina's Accession to the WTO. In Hughes, K. Lin, G. and Turner, J.L. (Ed). *Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures*. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Baer, Werner, B. 1972. "Import Substitution and Industrialization in Latin America: Experiences and Interpretations". *Latin American Research Review*. 7 : 95-122
- Balisacan, A.M & Ducanes, G.M. 2005. *Inequality in Asia: a synthesis of recent research on the levels, trends, effects and determinants of inequality in its*

- different dimensions*. London: Overseas Development Institute.
- Balisacan, A.M, Edillon, R.G & Piza, S.F.A. 2005. "Rural Poverty in Southeast Asia: Issues, Policies, and Challenges". *Asian Journal of Agriculture and Development*. 2 (1&2): 25-38
- Bello, Walden, David Kinley, and Elaine Elinson. 1988. *Development Debacle: The World Bank in the Philippines*. San Francisco: Institute for Food and Development Policy, Philippine Solidarity Network.
- Benjamin, D. et.all. 2005. *Income Inequality During Cina's Economic Transition*. Prepared for the forthcoming volume, *Cina's Economic Transition: Origins, Mechanisms, and Consequences*, edited by Loren Brandt and Thomas Rawski. <http://www.chass.utoronto.ca/~benjamin/BBGW.pdf>, diakses pada 31 Mei 2010.
- Bernardino, N.Y. 2004. "The ASEAN-Cina Free Trade Area: Issues and Prospects". *Asia Pacific Network on Food Sovereignty Regional Workshop Papers*. Manila, Philippines 6-9 November.
- Bowles, P & MacLean, B. 1996. "Understanding Trade Bloc Formation: The Case of the ASEAN Free Trade Area". *Review of International Political Economy*. 3 (2): 319-348.
- Bowles, P. 1997. "ASEAN, AFTA and the 'New Regionalism'". *Pacific Affairs*. 70 (2): 219-233.
- Castells, M. 2000. 'Materials for an exploratory theory of network society'. *British Journal of Sociology*. 51 (1): 5-24.
- , 2010a. *The Rise of the Network Society, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. I*. Second Edition with a New Preface. Oxford, UK: Blackwell Publishing Company.
- , 2010b. *The Power of Identity, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. II*. Second Edition with a New Preface. Oxford, UK: Blackwell Publishing Company.
- , 2010c. *End of Millennium, The Information Age: Economy, Society and Culture Vol. III*. Second Edition with a New Preface. Oxford, UK: Blackwell Publishing Company.
- Coe, N.M. et.all. 2004. "Globalizing' Regional Development: A Global Production Networks Perspective". *Transactions of the Institute of British Geographers*. 29 (4): 468-484.
- Chan, J. 2002. "Chinese Communist Party to declare itself open to the capitalist elite". <http://www.wsws.org/articles/2002/nov2002/chin-n13.shtml>, diakses pada 20 Mei 2010.
- Chan, J. 2003). "Chinese capitalism: industrial powerhouse or sweatshop of the world?". <http://www.wsws.org/articles/2003/jan2003/chin-j31.shtml>, diakses pada 20 Mei 2010.
- Chiang, T. B. 1988. "The Administration and Enforcement of Collective Agreements in Singapore." In *The Administration and Enforcement of*

- Collective Agreements—A Survey of the Current Situation in ASEAN*. Bangkok: International Labour Organization, pp. 239-46.
- Chow, G.C. 2001. "The Impact of Joining WTO on Cina's Economic, Legal and Political Institutions". *Paper presented at International Conference on Greater Cina and the WTO*, March 22-24.
- Derks, A. 2000. "Combating Trafficking in South-East Asia". *A Review of Policy and Programme Responses*. Geneva: International Organization for Migration (IOM).
- Dollar, D. 2007. *Poverty, inequality and social disparities during Cina's Economic Reform*. World Bank Policy Research Working Paper no. 4253.
- Fan, P. & Wan, G. 2008. Cina's Regional Inequity in Innovation Capability: 1995-2004. In Wan, G. (Ed). *Inequity and Growth in Modern Cina*. New York: Oxford University Press.
- Felker, G.B. 2003. "Southeast Asian industrialisation and the changing global production system". *Third World Quarterly*. 24 (2): 255-282.
- Gabriel, S J. 2006. *Chinese Capitalism and the Modernist Vision*. New York: Routledge.
- Graham, E.M. & Wada, E. 2002. *Foreign Direct Investment In Cina: Effects On Growth And Economic Performance*. Institute for International Economics Working Paper No. 01-03. <http://ssrn.com/abstract=300884> or doi:10.2139/ssrn.300884, diakses pada 16 Juni 2010.
- Hadiz, V. R. 1997. *Workers and The State In New Order Indonesia*. London & New York: Routledge.
- Hart-Landsberg, M & Burkett, P. 1998. "Contradictions of Capitalist Industrialization in East Asia: A Critique of 'Flying Geese' Theories of Development". *Economic Geography*. 74 (2): 87-110.
- Hill, H. 1994. "ASEAN Economic Development: An Analytical Survey-The State of the Field". *The Journal of Asian Studies*. 53 (3): 832-866.
- Hirschman, A.O. 1968. "The Political Economy of Import-Substituting Industrialization in Latin America". *The Quarterly Journal of Economics*. 82 (1): 1-32.
- Hossain, M. Kathuria, R. & Islam, I. 2010. *South Asian Economic Development*. Second edition. New York: Routledge.
- Hughes, K.H. 2002. Introduction. In Hughes, K. Lin, G. and Turner, J.L. (Ed). *Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures*. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Hughes, K. Lin, G. and Turner, J.L. 2002. *Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures*. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Hussey, A. 1993. "Rapid Industrialization in Thailand 1986-1991". *Geographical Review*. 83 (1): 14-28.
- Imada, P & Naya, S (eds). 1992. *AFTA: The Way Ahead*. Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

- Jianglin, Z. 2007. "Recent Development of Cina-ASEAN Trade and Economic Relations: From Regional Perspective". *Paper presented at Perspective International Conference on ASEAN-Cina Trade Relations: 15 Years Development and Prospects*, Hanoi, Dec. 6-8.
- Jones, G. W. 1997. "The thoroughgoing urbanisation of East and Southeast Asia". *Asia Pacific Viewpoint*. 38 (3): 237-249.
- Kurus, B. 1993. "Understanding ASEAN: Benefits and Raison d'Etire". *Asian Survey*. 33 (8): 819-831
- Kuruvilla, S. 1996. "Linkages Between Industrialization Strategies And Industrial Relations/Human Resource Policies: Singapore, Malaysia, The Philippines, And India". *Industrial and Labor Relations Review*. 49 (4): 635-657.
- Landry, P.F. 2008. *Decentralized Authoritarianism in Cina The Communist Party's Control of Local Elites in the Post-Mao Era*. New York: Cambridge University Press.
- Larsen, J.J. 2010. "Migration and people trafficking in southeast Asia". *Trends & Issues In Crime And Criminal Justice* No. 401.
- Lee, P. M-D. 2008. Widening Gap of Educational Oppurtunity? A Study of the Changing Patterns of Educational Attainment in Cina. In Wan, G. (Ed). *Inequility and Growth in Modern Cina*. New York: Oxford University Press.
- Li, L. & Vinten, G. 1997. "An overview of the experiences of Chinese industrialization strategies and development". *Managerial Auditing Journal*. 12(4/5): 183-191.
- Liang, Z. 2008. Financial Development, Growth, and Regional Disparity in Post-Reform Cina. In Wan, G. (Ed). *Inequility and Growth in Modern Cina*. New York: Oxford University Press.
- Lin, J.Y & Liu, P. 2008. Development Strategies and Regional Incomes Disparities in Cina . In Wan, G. (Ed). *Inequility and Growth in Modern Cina*. New York: Oxford University Press.
- Lin, G. 2002. State-Owned Enterprises under Siege. In Hughes, K. Lin, G. and Turner, J.L. (Ed). *Cina and the WTO Domestic Challenges and International Pressures*. Washington: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Lin, X, & Germain, R. 2003. "Organizational Structure, Context, Customer Orientation, and Performance: Lessons from Chinese State-Owned Enterprises". *Strategic Management Journal*. 24 (11): 1131-1151.
- Mirza, H & Giroud, A. 2003. "Regionalisation, Foreign Direct Investment and Poverty Reduction: The Case of ASEAN". *Experts' Meeting On Foreign Direct Investment In Developing Asia*. Asian Development Bank & OECD Development Centre Paris - Wednesday 26 & Thursday 27 November.
- Morrison, WM. 2009. *Cina and the Global Financial Crisis: Implications for the United States*. Congressional Research Service. <http://www.fas.org/>

- sgp/crs/row/RS22984.pdf, diakses 6 Juni 2010.
- Nainggolan, P.P. 1995. *Reformasi Ekonomi RRC Era Deng Xiaoping: Pasar Bebas dan Kapitalisme Dihidupkan Lagi*. Jakarta: Sinar Harapan.
- Nixon, I.F. 1990. *The Industrialisation Debate*. Manchester: University of Manchester.
- Pananond, P. 2008. "Outward foreign direct investment from Asean: Implications for regional integration". *Paper submitted to the International Conference on 'The Future of Economic Integration in Asia', Imperial Queens Park Hotel, Bangkok, Thailand, 20-21 November*.
- Piei, M.H. 2005. An East Asia FTA: A Malaysian Perspective. In Ahn, C.Y, Baldwin, R E. and Cheong, I. *East Asian Economic Regionalism Feasibilities and Challenges*. Dordrecht: Springer..
- Poon-Kim, S. 1977. "A Decade of ASEAN, 1967-1977". *Asian Survey*. 17 (8): 753-770.
- Prawiro, R. 1998. *Indonesia's Struggle for Economic Development: Pragmatism in Action*. Singapore: Oxford University Press.
- Sheng, Y.K. 2004. "Youth and Urban Conflict in Southeast Asian Cities". In Lisa M. Hanley Blair A. Ruble and Joseph S. Tulchin (Ed). *Youth, Poverty, And Conflict In Southeast Asian Cities. Comparative Urban Studies Project*. Washington, D.C: Woodrow Wilson International Center for Scholars.
- Sicular, T. et.all. 2008. The Urban-Rural Income Gap and Income Inequality in Cina. In Wan, G. (Ed). *Understanding Inequality and Poverty in Cina: Methods and Applications*. New York: Palgrave Macmillan.
- Tan, L.H. 2004. "Will Asean Economic Integration Progress beyond a Free Trade Area?". *The International and Comparative Law Quarterly*. 53 (4): 935-967.
- The World Bank. 2009. *World Development Indicators 2009*. Washington DC: Green Press Initiatives.
- Wan, G. (Ed.). 2008. *Inequility and Growth in Modern Cina*. New York: Oxford University Press.
- Wang, X. 2008. Income Inequility in Cina and Its Influencing Factors. In Wan, Guanghua (Ed). *Inequility and Growth in Modern Cina*. New York: Oxford University Press.
- Weatherley, R. 2006. *Politics in Cina Since 1949: Legitimizing authoritarian rule*. New York: Routledge.
- Winters, J.A. 1996. *Power in Motion: Capital Mobility and the Indonesian State*. New York: Cornell University Press.
- Wong, J & Chan, S. 2003. "Cina-Asean Free Trade Agreement: Shaping Future Economic Relations". *Asian Survey*. 43 (3): 507-526.
- Yao, S. 2005. *Economic Growth, Income Distribution and Poverty Reduction in Contemporary Cina*. New York: RoutledgeCurzon.

- Yang, D.T; Chen, V. and Monarch, R. 2009. "Rising Wages: Has Cina Lost Its Global Labor Advantage?" Economics Program Working Paper Series #09 - 03: The Conference Board. [www.conference-board.org/economics/workingpapers.cfm?pdf=E-0043-09-WP](http://www.conference-board.org/economics/workingpapers.cfm?pdf=E-0043-09-WP), diakses pada 31 Mei 2010.
- Yeung, H.WC. 1993. "Business Networks and Transnational, Corporations: A Study of Hong Kong Firms in the ASEAN Region". *Economic Geography*. 73 (1): 1-25.
- Yoshihara, K. 1988. *The Rise of Ersatz Capitalism in South-East Asia*. Singapore: Oxford University Press.
- Yoshimatsu, H. 2002. "Preferences, Interests, and Regional Integration: The Development of the ASEAN Industrial Cooperation Arrangement". *Review of International Political Economy*. 9 (1): 123-149.
- Yu, A.L. 2009. "Cina End of a Model...or Birth of a New One?" Online magazine: IV414 July. <http://www.internationalviewpoint.org/spip.php?article1701>, diakses pada 20 Mei 2010.
- Yue, C.S. 2004. "ASEAN-Cina Free Trade Area". *Paper for presentation at the AEP Conference*. Hong Kong 12-13 April.
- Zhang, M. 2003. *Cina's Poor Regions*. New York: RoutledgeCurzon.
- Zhang, Y & Wan, G. 2008. Poverty Reduction in Cina: Trends and Causes. In Wan, G. (Ed). *Inequity and Growth in Modern Cina*. New York: Oxford University Press.

### Sumber lain

- ASEAN Invesment Report. 2009. "Sustained FDI Flows Dependent on Global Economic Recovery". <http://www.aseansec.org/documents/AIR2009.pdf>, diakses pada 7 Juni 2010.
- ASEAN Secretariat. 2010. "ASEAN-Cina Free Trade Area: Not a Zero-Sum Game". <http://www.aseansec.org/24161.htm>", diakses pada 6 Juni 2010.
- Asia Times. 2002. "Gap grows between Vietnam's haves and have-nots", April 10.
- BBC News. 2009. "Cina's economic growth slows", January 22nd
- BPS. 1994. *Sensus Pertanian 1993*. Jakarta: Badan Pusat Statistik.
- BPS. 2004. 'Pertumbuhan Rumah Tangga Pertanian Di Indonesia'. *Berita Resmi Statistik*: No. 06 /VII/2 Januari.
- BPS. 2010. 'Profil Kemiskinan Indonesia Maret 2010'. *Berita Resmi Statistik*: No. 45/07/Th. XIII, 1 Juli.
- Bello, W. 2010. "The Cina-Asean Free Trade Area: propaganda and reality", Asia News Network, January 15th.
- CIA The World Factbook. 2010. "Distribution of family income - Gini index". <https://www.cia.gov/library/publications/the-world-factbook/rankorder/2172rank.html>, diakses pada 7 Juni 2010.

- Investor Daily. 2007. "Ketimpangan Ekonomi Kian Melebar", 23 November.
- Kuncoro, M. 2007. "Ketimpangan Ekonomi Kian Melebar", *Investor Daily* 23 November.
- Ministry of Commerce The People's Republic of Cina. 2010a. "Trade with Countries and Regions in Asia (1-3)": <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/AsiaAfrica/201005/20100506898014.html>, diakses pada 15 Juni 2010.
- Ministry of Commerce The People's Republic of Cina. 2010b. "Trade with Countries and Regions in Asia (1-10)". <http://english.mofcom.gov.cn/aarticle/statistic/AsiaAfrica/201001/20100106726761.html>, diakses pada 15 Juni 2010.
- People Daily. 2009. "Cina-ASEAN free trade area brings in new, greater opportunity", October 19th.
- People Daily. 2010. "ASEAN exports to Cina boosted by Cina-ASEAN FTA", February 25th.
- People Daily. 2009. "Cina-ASEAN Investment Agreement signed", August 15th.
- UNDP. 2004. "Human Development Report 2004", [http://hdr.undp.org/en/media/hdr04\\_complete.pdf](http://hdr.undp.org/en/media/hdr04_complete.pdf), diakses 7 Juni 2010.
- Wibowo, I, "Cina Membela Buruhnya", *Kompas*, 24 Juni 2010.
- Xinhua Daily. 2009. "Cina, ASEAN trade ties to enter new stage as FTA established: Vice Premier", October 20th. [http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/content\\_12273465.htm](http://news.xinhuanet.com/english/2009-10/content_12273465.htm), diakses pada 7 Juni 2010.